



**Pemerintah
Kota Cirebon**

RENJA 2025

**Dinas Komunikasi
Informatika dan Statistik
Kota Cirebon**



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT berkat Rahmat dan Karunia-Nya kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025 Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (DKIS) Kota Cirebon Tahun 2025.

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025 merupakan rencana tahunan yang telah tertuang di dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (DKIS) periode Tahun 2024-2026. Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023.

Sebagai Perangkat Daerah yang mempunyai tugas tersebut, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Cirebon berkewajiban dan mempunyai tanggung jawab membantu Pemerintah dalam mensosialisasikan kebijakan dan rencana kebijakan Pemerintah, bagaimana merumuskan strategi yang efektif untuk mengkomunikasikan dan menyebarluaskan informasi yang dibutuhkan masyarakat seiring dengan berkembangnya informasi teknologi yang semakin pesat, kiranya untuk pelaksanaan hal tersebut tentu perlu perencanaan.

Penyusunan Renja juga merupakan salah satu upaya untuk memberantas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Penjabaran APBD dalam RKA yang sedemikian rinci yang membandingkan input untuk menghasilkan suatu output yang berorientasi hasil. Dokumen penyusunan Renja Kerja (RENJA) Tahun 2025 diharapkan dapat mendorong bagi pembangunan Kota Cirebon sesuai RPJMD. Diharapkan pembelanjaan uang negara semakin jelas dan terukur. Akhirnya setiap rupiah uang negara atau daerah bermanfaat bagi masyarakat dan aparatur pemerintahan. Penyusunan Renja Kerja (RENJA) yang baik adalah pekerjaan yang mudah, namun yang lebih baik adalah bagaimana Renja Kerja (RENJA) yang disusun itu betul-betul berorientasi kepada azas manfaat, berdayaguna bagi seluruh pihak.

Cirebon, 2024
Kepala Dinas Komunikasi Informatika
Dan Statistik Kota Cirebon



MA'RUF NURYASA, AP.,MM
NIP 19760330 199602 1 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR..... i

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang.....1

1.2 Landasan Hukum.....28

1.3 Maksud dan Tujuan29

1.4 Sistematika Penyusunan29

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DKIS TAHUN 2023.....31

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Cirebon Tahun 2023.....31

BAB III TUJUAN DAN SASARAN71

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi71

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja71

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH74

4.1 Program dan Kegiatan74

BAB V PENUTUP92

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Pertauran Pemerintah yang telah menetapkan bahwa setiap daerah diwajibkan untuk menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah Jangka Panjang (RPDJP), Rencan Pembanguna Daerah (RPD) Rencana Pembangunan Daerah Jangka Satu Tahun dan Rencana Pembangunan pada masing-masing Perangkat Daerah setiap tahunnya yang dituangkan dalam Rencana Kerja (RENJA).

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Cirebon adalah dokumen perencanaan yang memuat kebijakan publik dan arah kebijakan pembangunan DKIS selama satu tahun yang akan digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta tolok ukur pencapaian kinerja yang akan dilaksanakan pada Tahun 2025 yang akan datang, sehingga diharapkan dapat menciptakan kepastian kebijakan sebagai komitmen Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Cirebon yang harus dilaksanakan secara konsisten, sehingga seluruh kegiatan yang direncanakan dapat berjalan dengan baik.

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka urusan komunikasi dan informatika serumpun dengan urusan persandian dan statistik, dan dijelaskan pula dalam Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Dengan perumpunan ini menimbulkan konsekuensi perubahan tugas dan fungsi kominfo sesuai dengan Peraturan Menteri Kominfo No. 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika dan Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Perangkat Daerah Dan Unit Kerja Pada Perangkat Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Persandian. Dengan tugas dan fungsinya yang baru menjadi dasar penyusunan Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Cirebon.

Rencana Strategik kemudian dipertajam melalui perumusan Rencana Kerja (Renja). Rencana Kerja (Renja) merupakan salah satu komponen dari siklus akuntabilitas kinerja yang dimulai dari perencanaan strategik, dan diakhiri adanya Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP).

Undang – Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah menyebutkan fungsi perencanaan dilaksanakan langsung oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda). Perencanaan sendiri

dibagi menjadi tiga bagian berdasarkan jangka waktu yang menjadi periode pelaksanaan tersebut yaitu jangka panjang (20 tahun), jangka menengah (5 tahun), dan tahunan. Perencanaan tahunan disusun berdasarkan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (musrenbang) tahunan yang bahannya berasal dari Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) dan hasil Musrenbang di tingkat Kecamatan. Menindaklanjuti proses perencanaan tersebut maka Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Cirebon menyusun dokumen Rencana Tahunan yang disebut dengan Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Cirebon Tahun 2025.

Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Cirebon Tahun 2025 untuk selanjutnya disebut Renja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Cirebon Tahun 2025 berdasarkan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Pasal 1 point 11 dan Pasal 7 ayat (2) adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Renja SKPD disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKP, memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Atas dasar alur tersebut Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (DKIS) Kota Cirebon menyusun Rencana Kerja tahun 2025 yang menyajikan target kinerja tahun 2025 dalam upaya pelaksanaan amanat yang tertuang dalam Rencana Strategik serta tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Cirebon.

Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Kerja DKIS Tahun 2025 adalah :

1. Menjadi acuan / dasar dalam merencanakan dan menentukan langkah-langkah strategis guna meningkatkan dan mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DKIS selama kurun waktu 1 (satu) tahun ke depan dalam rangka mendukung pembangunan yang mengacu kepada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Cirebon Tahun 2024-2026;
2. Menyediakan dokumen resmi bagi DKIS Kota Cirebon dalam rangka menyusun perencanaan, menentukan prioritas dan menyusun program dan kegiatan DKIS Kota Cirebon pada tahun 2025 yang dibiayai dengan APBD Kota Cirebon;
3. Menyediakan arahan/pedoman bagi aparatur DKIS Kota Cirebon dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2025;

4. Membuat pengukuran kinerja DKIS dalam pelaksanaan akuntabilitas dan integritas organisasi.

Tujuan Penyusunan Rencana Kerja DKIS Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Menterjemahkan program pembangunan dalam RPD Kota Cirebon 2024-2026 secara nyata ke dalam program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi DKIS;
2. Mewujudkan perencanaan dan penganggaran terpadu yang berbasis hasil/kinerja;
3. Menciptakan mekanisme pelaksanaan program dan kegiatan yang fokus, tidak tumpang tindih dan terintegrasi;
4. Membangun sistem penilaian kinerja yang terukur, transparan dan akuntabel;
5. Sebagai pedoman dan pengendali kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2025;
6. Menjamin optimalnya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi pelaksanaan program dalam rangka mendukung program pemerintah daerah;
7. Menjamin tercapainya pemanfaatan seluruh sumber daya yang ada secara efektif, efisien dan berkelanjutan;
8. Menjaga kontinuitas kegiatan dan proses pembangunan agar selaras dengan program prioritas tahunan daerah;

Tugas dan Fungsi

Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Cirebon dibentuk berdasarkan:

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah ;
- Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 06 Tahun 2016 tentang Rincian Urusan Pemerintahan yang Diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon;
- Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah

Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

- Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 05 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon;
- Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 96 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Cirebon.

DKIS Kota Cirebon mempunyai tugas pokok membantu Wali Kota melaksanakan tugas urusan pemerintahan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah di bidang Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian. Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, DKIS Kota Cirebon mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan pelaksanaan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah bidang Komunikasi, informatika, statistik dan persandian;
- b. pelaksanaan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian;
- d. pelaksanaan administrasi dinas dalam pelaksanaan urusan pemerintahan bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 06 Tahun 2016 tentang Rincian Urusan Pemerintahan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon, DKIS Kota Cirebon mempunyai 3 (tiga) urusan yang ditangani, yaitu:

1. Urusan Bidang Komunikasi dan Informatika;
2. Urusan Bidang Statistik; dan
3. Urusan Bidang Persandian.

Berikut adalah rincian kewenangan dari urusan yang ditangani oleh DKIS Kota Cirebon:

1. Urusan Bidang Komunikasi dan Informatika

Tabel 1 Urusan Bidang Komunikasi dan Informatika

No.	Sub Urusan	Rincian Urusan
1.	Informasi dan Komunikasi Publik	Pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah
2.	Aplikasi Informatika	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
		Pengelolaan E-Government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

2. Urusan Bidang Statistik

Tabel 2 Urusan Bidang Statistik

No.	Sub Urusan	Rincian Urusan
1.	Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Penyelenggaraan Statistik Sektoral Di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota.

3. Urusan Bidang Persandian

Tabel 3 Urusan Bidang Persandian

No.	Sub Urusan	Rincian Urusan
1.	Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
		Penerapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar-Perangkat Daerah Kabupaten/Kota

Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 96 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Cirebon. Untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DKIS Kota Cirebon telah ditetapkan susunan organisasi dan tata kerja sebagai berikut:

A. Unsur Organisasi

Unsur Organisasi Dinas terdiri dari:

- 1) Kepala Dinas;
- 2) Sekretariat terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Program dan Pelaporan
- 3) Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik;
- 4) Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- 5) Bidang Layanan E-Government;
- 6) Bidang Persandian dan Keamanan Informasi;
- 7) UPT; dan
- 8) Kelompok Jabatan Fungsional.

Bidang Tugas Unsur Organisasi

A. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok memimpin dan menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik.

Kepala Dinas mempunyai fungsi:

- a. perumusan dan penetapan kebijakan umum perencanaan, program dan kegiatan Dinas;
- b. perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas;
- c. penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas;
- d. pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas;
- e. pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya;
- f. pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas;
- g. pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas; dan
- h. pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan Wali Kota serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Sekretariat

Sekretariat sebagai unsur staf mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam pembinaan dan pemberian layanan administrasi penyusunan perencanaan, penatausahaan, keuangan, sumber daya manusia aparatur, kerumahtanggaan, arsip dan perpustakaan, organisasi

dan tatalaksana, kerja sama, hubungan masyarakat, protokol, pengelolaan barang milik daerah/negara dan dokumentasi dinas serta melaksanakan pengoordinasian penyusunan peraturan perundang-undangan dan bantuan hukum dalam penyelenggaraan tugas dinas. Sekretaris diberi tugas tambahan selaku Koordinator Kelompok Jabatan fungsional dalam lingkup jabatannya. Sekretaris dalam menjalankan tugas pokoknya dibantu oleh Sub Koordinator Keuangan.

Sekretaris mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana kerja sekretariat;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional dalam lingkup bidang tugas sekretariat Dinas;
- c. pengoordinasian penyiapan bahan penyusunan perencanaan lingkup bidang tugas sekretariat Dinas;
- d. pengoordinasian penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional bidang komunikasi dan informatika, statistik serta persandian;
- e. pengoordinasian penyelenggaraan tugas Dinas;
- f. penyiapan bahan bimbingan dan pengendalian teknis Dinas;
- g. pengoordinasian penyiapan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan tugas Dinas;
- h. pengelolaan layanan administrasi dalam lingkup bidang tugas sekretariat Dinas;
- i. pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pengelolaan layanan administrasi dalam lingkup bidang tugas sekretariat Dinas; dan
- j. pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan Wali Kota serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sekretariat membawahkan:

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Sub Bagian Program dan Pelaporan; dan

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum sebagai pembantu unsur staf dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Umum mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam penyiapan dan pelaksanaan pemberian layanan administrasi meliputi sumber daya manusia aparatur, kerumahtanggaan, arsip dan perpustakaan, hubungan masyarakat, protokol, sistem informasi, pengelolaan barang milik daerah/negara dan dokumentasi dinas.

Sub Bagian Umum mempunyai fungsi:

- a) penyusunan perencanaan, program dan kegiatan lingkup Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b) penyiapan bahan perumusan kebijakan umum lingkup Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- c) pemfasilitasian dan koordinasi pelaksanaan tugas lingkup Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- d) pelaksanaan pemberian layanan administrasi lingkup Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- e) pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- f) pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas lingkup Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
- g) pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.

b. Sub Bagian Program dan Pelaporan

Sub Bagian Program dan Pelaporan sebagai pembantu unsur staf dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam pelaksanaan penyusunan rencana program dan pelaporan, evaluasi dan penilaian kinerja, pelaksanaan penataan organisasi dan tatalaksana, penyiapan koordinasi dan administrasi kerja sama antar lembaga.

Sub Bagian Program dan Pelaporan mempunyai fungsi:

- a) penyusunan perencanaan, program dan kegiatan lingkup Sub Bagian Program dan Pelaporan;
- b) penyiapan bahan perumusan kebijakan umum lingkup Sub Bagian Program dan Pelaporan;
- c) pemfasilitasian dan koordinasi pelaksanaan tugas lingkup Sub Bagian Program dan Pelaporan;
- d) pelaksanaan pemberian layanan administrasi lingkup Sub Bagian Program dan Pelaporan;
- e) pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok Sub Bagian Program dan Pelaporan;
- f) pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas lingkup Sub Bagian Program dan Pelaporan; dan

- g) pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.

c. Sub Koordinator Keuangan

Sub Koordinator Keuangan mempunyai fungsi:

- a) Menyiapkan kegiatan penyusunan perencanaan, program dan kegiatan lingkup Keuangan;
- b) penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah lingkup keuangan;
- c) menyiapkan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
- d) menyiapkan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan tugas lingkup keuangan;
- e) menyiapkan kegiatan pelaksanaan penyusunan dan pengelolaan anggaran, pelaksanaan kebijakan anggaran, perbendaharaan, verifikasi, pelaporan dan pertanggungjawaban anggaran dan keuangan, pelaksanaan teknis pengelolaan administrasi keuangan, penatausahaan keuangan, pembinaan dan fasilitasi perbendaharaan, anggaran dan pertanggungjawaban;
- f) menyiapkan kegiatan bimbingan teknis dan supervise, pemantuan, analitis, monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan lingkup keuangan; dan
- g) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.

C. Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik

Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas meliputi perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan sub bidang urusan pengelolaan dan layanan informasi, pengelolaan komunikasi serta hubungan masyarakat. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik mempunyai tugas tambahan selaku coordinator Kelompok JABatan Fungsional dalam lingkup tanggung jawabnya.

Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana kerja Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional dalam lingkup tugas Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik;
- c. pengoordinasian penyiapan bahan penyusunan perencanaan lingkup tugas Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik;
- d. pengoordinasian penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik;
- e. pengoordinasian penyelenggaraan tugas Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik;
- f. penyiapan bahan bimbingan dan pengendalian teknis Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik;
- g. pengoordinasian penyiapan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan tugas Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik;
- h. pengelolaan layanan administrasi dalam lingkup tugas Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik;
- i. pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pengelolaan layanan administrasi dalam lingkup tugas Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik; dan
- j. pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan Wali Kota serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya dibantu oleh :

- a. Sub Koordinator Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik;
- b. Sub Koordinator Pengelolaan Komunikasi Publik; dan
- c. Sub Koordinator Kemitraan Komunikasi.

1) Sub Koordinator Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik

Sub Koordinator Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik mempunyai tugas:

- a) menyiapkan kegiatan penyusunan perencanaan, program dan kegiatan lingkup pengelolaan dan layanan informasi publik;
- b) menyiapkan bahan perumusan kebijakan daerah lingkup pengelolaan dan layanan informasi publik;

- c) menyiapkan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya;
- d) menyiapkan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan tugas lingkup pengelolaan dan layanan informasi publik;
- e) menyiapkan kegiatan pelaksanaan kebijakan lingkup pengelolaan dan layanan informasi publik meliputi pelaksanaan perumusan kebijakan teknis bidang informasi dan komunikasi publik, monitoring opini dan aspirasi publik, pelayanan informasi publik, penguatan tata kelola komisi informasi di daerah kota, penyediaan/pengadaan sarana dan prasarana pendukung informasi dan komunikasi publik pemerintah Daerah Kota;
- f) menyiapkan kegiatan bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, analisis, monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan lingkup pengelolaan dan layanan informasi publik; dan
- g) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.

2) Sub Koordinator Pengelolaan Komunikasi Publik

Sub Koordinator Pengelolaan Komunikasi Publik mempunyai tugas:

- a) menyiapkan kegiatan penyusunan perencanaan, program dan kegiatan lingkup pengelolaan komunikasi publik;
- b) menyiapkan bahan perumusan kebijakan daerah lingkup pengelolaan komunikasi publik;
- c) menyiapkan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya;
- d) menyiapkan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan tugas lingkup pengelolaan komunikasi publik;
- e) menyiapkan kegiatan pelaksanaan kebijakan lingkup pengelolaan komunikasi publik meliputi pelaksanaan monitoring informasi dan penetapan agenda prioritas komunikasi pemerintah daerah, pengelolaan konten dan perencanaan media komunikasi publik, pengelolaan media komunikasi publik, manajemen komunikasi krisis serta penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik;
- f) menyiapkan kegiatan bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, analisis, monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan lingkup pengelolaan komunikasi publik; dan

- g) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.

3) **Sub Koordinator Kemitraan Komunikasi**

Sub Koordinator Kemitraan Komunikasi mempunyai tugas:

- a) Menyiapkan kegiatan perencanaan, program dan kegiatan lingkup Kemitraan Komunikasi;
- b) menyiapkan bahan perumusan kebijakan daerah lingkup Kemitraan Komunikasi;
- c) menyiapkan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya;
- d) menyiapkan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan tugas lingkup Kemitraan Komunikasi;
- e) menyiapkan kegiatan pelaksanaan kebijakan lingkup kemitraan komunikasi meliputi pelaksanaan layanan hubungan media, kemitraan dengan pemangku kepentingan serta penyelenggaraan hubungan masyarakat, media dan kemitraan komunitas;
- f) menyiapkan kegiatan bimbingan teknis dan supervise, pemantauan, analisis, monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan lingkup kemitraan komunikasi; dan;
- g) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.

D. Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi

Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas meliputi perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan sub bidang urusan pengelolaan Domain, penatalaksanaan dan pengawasan serta sistem jaringan informatika. Kepala Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi diberi tugas tambahan selaku coordinator kelompok jabatan fungsional dalam lingkup tanggung jawabnya.

Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana kerja Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional dalam lingkup tugas Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- c. pengoordinasian penyiapan bahan penyusunan perencanaan lingkup tugas Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- d. pengoordinasian penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- e. pengoordinasian penyelenggaraan tugas Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- f. penyiapan bahan bimbingan dan pengendalian teknis Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- g. pengoordinasian penyiapan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan tugas Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- h. pengelolaan layanan administrasi dalam lingkup tugas Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- i. pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pengelolaan layanan administrasi dalam lingkup tugas Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi; dan
- j. pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan Wali Kota serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya dibantu oleh :

- a. Sub Koordinator Pengelolaan Domain;
- b. Sub Koordinator Penatalaksanaan dan Pengawasan; dan
- c. Sub Koordinator Sistem Jaringan Informatika.

1) Sub Koordinator Pengelolaan Domain

Sub Koordinator Pengelolaan Domain mempunyai tugas:

- a) Menyiapkan kegiatan penyusunan perencanaan, program dan kegiatan lingkup Pengelolaan Domain;
- b) menyiapkan bahan perumusan kebijakan daerah lingkup Pengelolaan Domain;

- c) menyiapkan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya;
- d) menyiapkan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan tugas lingkup Pengelolaan Domain;
- e) menyiapkan kegiatan pelaksanaan kebijakan lingkup pengelolaan domain meliputi pelaksanaan pendaftaran nama domain pemerintah daerah kota;
- f) menyiapkan kegiatan bimbingan teknis dan supervise, pemantauan, analisis, monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan lingkup Pengelolaan Domain;
- g) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.

2) Sub Koordinator Penatalaksanaan dan Pengawasan

Sub Koordinator Penatalaksanaan dan Pengawasan mempunyai tugas:

- a) menyiapkan kegiatan penyusunan perencanaan, program dan kegiatan lingkup penatalaksanaan dan pengawasan;
- b) menyiapkan bahan perumusan kebijakan daerah lingkup penatalaksanaan dan pengawasan;
- c) menyiapkan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya;
- d) menyiapkan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan tugas lingkup penatalaksanaan dan pengawasan;
- e) menyiapkan kegiatan pelaksanaan kebijakan lingkup penatalaksanaan dan pengawasan meliputi pelaksanaan penatalaksanaan dan pengawasan nama domain dan sub domain dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- f) menyiapkan kegiatan bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, analisis, monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan lingkup penatalaksanaan dan pengawasan; dan
- g) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.

3) Sub Koordinator Sistem Jaringan Informatika

Sub Koordinator Sistem Jaringan Informatika mempunyai tugas:

- a) Menyiapkan kegiatan penyusunan perencanaan, program dan kegiatan lingkup Sistem Jaringan Informatika;
- b) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan daerah lingkup Sistem Jaringan Informatika;
- c) Menyiapkan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya;
- d) Menyiapkan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan tugas lingkup Sistem Jaringan Informatika;
- e) Menyiapkan kegiatan pelaksanaan kebijakan lingkup system jaringan informatika meliputi pelaksanaan penyelenggaraan system jaringan intra pemerintah daerah kota;
- f) Menyiapkan kegiatan bimbingan teknis dan supervise, pamantauan, analisis, monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan system jaringan informatika; dan
- g) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.

E. Bidang Layanan E-Government

Bidang Layanan *E-Government* mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas meliputi perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan sub bidang urusan tata kelola *e-government*, pengembangan ekosistem *e-government* serta pengembangan aplikasi. Kepala Bidang Layanan *E-Government* diberi tugas tambahan selaku Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional dalam lingkup tanggung jawabnya.

Bidang Layanan *E-Government* mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana kerja bidang layanan *e-government*;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional dalam lingkup tugas bidang layanan *e-government*;
- c. pengoordinasian penyiapan bahan penyusunan perencanaan lingkup tugas bidang layanan *e-government*;
- d. pengoordinasian penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional bidang layanan *e-government*;
- e. pengoordinasian penyelenggaraan tugas bidang layanan *e-government*;

- f. penyiapan bahan bimbingan dan pengendalian teknis bidang layanan e-government;
- g. pengoordinasian penyiapan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan tugas bidang layanan e-government;
- h. pengelolaan layanan administrasi dalam lingkup tugas bidang layanan e-government;
- i. pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pengelolaan layanan administrasi dalam lingkup tugas bidang layanan e-government; dan
- j. pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan Wali Kota serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bidang Layanan *E-Government*, dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya dibantu oleh::

- a. Sub Koordinator Tata Kelola *E-Government*;
- b. Sub Koordinator Pengelolaan Pusat Data; dan
- c. Sub Koordinator Pengembangan Aplikasi.

a. Sub Koordinator Tata Kelola E-Government

Sub Koordinator Tata Kelola *E-Government* mempunyai tugas:

- a) Menyiapkan kegiatan penyusunan perencanaan, program dan kegiatan lingkup data Kelola *E-Government*;
- b) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan daerah lingkup tata kelola *E-Government*;
- c) Menyiapkan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya;
- d) Menyiapkan fasilitas dan koordinasi pelaksanaan tugas lingkup tata kelola *E-Government*;
- e) Menyiapkan kegiatan pelaksanaan kebijakan lingkup tata kelola *E-Government*; meliputi pelaksanaan penatalaksanaan dan pengawasan *E-Government*; dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, penyelenggara pemerintah daerah, penyelenggaraan sistem penghubung layanan pemerintah serta pengelolaan *Government Chief Information Officer (GCIO)*;

- f) Menyiapan kegiatan bimbingan teknis dan supevisi, pemantauan, analisis, monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan lingkup tata kelola *E-government*; dan
- g) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan dalam lingkup yang diberikan oleh pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya

b. Sub Koordinator Pengelolaan Pusat Data

Sub Koordinator Pengelolaan Pusat Data mempunyai tugas:

- a) Menyiapkan kegiatan penyusunan perencanaan, program dan kegiatan lingkup pengelolaan pusat data;
- b) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan daerah lingkup pengelolaan pusat data;
- c) Menyiapan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawab;
- d) Menyiapkan fasilitas dan koordinasi pelaksanaan tugas lingkup pengelolaan pusat data;
- e) menyiapkan kegiatan pelaksanaan kebijakan lingkup pengelolaan pusat data meliputi pelaksanaan sinkronisasi pengelolaan rencana induk dan anggaran pemerintahan berbasis elektronik, pengelolaan pusat data pemerintah daerah kota, penyelenggaraan sistem komunikasi intra Pemerintah Daerah Kota, pengembangan dan pengelolaan ekosistem kota cerdas dan kota cerdas serta monitoring, evaluasi dan pelaporan pengembangan ekosistem SPBE;
- f) menyiapkan kegiatan bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, analisis, monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan lingkup pengelolaan pusat data; dan
- g) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.

c. Sub Koordinator Pengembangan Aplikasi

Sub Koordinator Pengembangan Aplikasi mempunyai tugas:

- a) menyiapkan kegiatan penyusunan perencanaan, program dan kegiatan lingkup pengembangan aplikasi;
- b) menyiapkan bahan perumusan kebijakan daerah lingkup pengembangan aplikasi;
- c) menyiapkan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya;

- d) menyiapkan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan tugas lingkup pengembangan aplikasi;
- e) menyiapkan kegiatan pelaksanaan kebijakan lingkup pengembangan aplikasi meliputi pelaksanaan sistem keamanan informasi, data dan informasi elektronik, pengembangan aplikasi dan proses bisnis pemerintahan berbasis elektronik serta pengembangan dan pengelolaan sumber daya teknologi informasi dan komunikasi pemerintah daerah;
- f) menyiapkan kegiatan bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, analisis, monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan lingkup pengembangan aplikasi; dan
- g) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya

F. Bidang Statistik Sektoral

Bidang Statistik Sektoral sebagai unsur lini yang dipimpin seorang Kepala Bidang, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas meliputi perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi, penyusunan norma, standard, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan sub bidang urusan pengumpulan dan analisis data, sumber daya statistik sektor serta layanan dan penyebarluasan data. Kepala Bidang diberi tugas tambahan selaku Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional dalam lingkup tanggung jawabnya.

Bidang Statistik Sektoral mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana kerja Bidang Statistik Sektoral;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional dalam lingkup tugas Bidang Statistik Sektoral;
- c. pengoordinasian penyiapan bahan penyusunan perencanaan lingkup tugas Bidang Statistik Sektoral;
- d. pengoordinasian penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional Bidang Statistik Sektoral;
- e. pengoordinasian penyelenggaraan tugas Bidang Statistik Sektoral;
- f. penyiapan bahan bimbingan dan pengendalian teknis Bidang Statistik Sektoral;
- g. pengoordinasian penyiapan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan tugas Bidang Statistik Sektoral;

- h. pengelolaan layanan administrasi dalam lingkup tugas Bidang Statistik Sektoral;
- i. pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pengelolaan layanan administrasi dalam lingkup tugas Bidang Statistik Sektoral; dan
- j. pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan Wali Kota serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bidang Statistik Sektoral, dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya dibantu oleh:

- a. Sub Koordinator Pengumpulan dan Analisis Data;
- b. Sub Koordinator Sumber Daya Statistik Sektoral; dan
- c. Sub Koordinator Layanan dan Penyebarluasan Data.

a. Sub Koordinator Pengumpulan dan analisis Data

Sub Koordinator Pengumpulan dan Analisis Data mempunyai tugas:

- a) menyiapkan kegiatan penyusunan perencanaan, program dan kegiatan lingkup pengumpulan dan analisis data;
- b) menyiapkan bahan perumusan kebijakan daerah lingkup pengumpulan dan analisis data;
- c) menyiapkan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya
- d) menyiapkan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan tugas lingkup pengumpulan dan analisis data;
- e) menyiapkan kegiatan pelaksanaan kebijakan lingkup pengumpulan dan analisis data meliputi pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan, pengolahan, analisis dan diseminasi data statistik sektoral serta membangun metadata statistik sektoral;
- f) menyiapkan kegiatan bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, analisis, monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan lingkup pengumpulan dan analisis data; dan
- g) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.

b. Sub Koordinator Layanan dan Penyebarluasan Data

Sub Koordinator Layanan dan Penyebarluasan Data mempunyai tugas:

- a) menyiapkan kegiatan penyusunan perencanaan, program dan kegiatan lingkup layanan dan penyebarluasan data;
- b) menyiapkan bahan perumusan kebijakan daerah lingkup layanan dan penyebarluasan data;
- c) menyiapkan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya
- d) menyiapkan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan tugas lingkup layanan dan penyebarluasan data;
- e) menyiapkan kegiatan pelaksanaan kebijakan lingkup layanan dan penyebarluasan data meliputi pelaksanaan peningkatan kapasitas kelembagaan statistik sektoral serta penyelenggaraan otoritas statistik sektoral di Daerah Kota;
- f) menyiapkan kegiatan bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, analisis, monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan lingkup layanan dan penyebarluasan data; dan
- g) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.

c. Sub Koordinator Sumber Daya Statistik Sektoral

Sub Koordinator Sumber Daya Statistik Sektoral mempunyai fungsi:

- a) menyiapkan kegiatan penyusunan perencanaan, program dan kegiatan lingkup sumber daya statistik sektoral;
- b) menyiapkan bahan perumusan kebijakan daerah lingkup sumber daya statistik sektoral;
- c) menyiapkan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya;
- d) menyiapkan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan tugas lingkup sumber daya statistik sektoral;
- e) menyiapkan kegiatan pelaksanaan kebijakan lingkup sumber daya statistik sektoral meliputi peningkatan SDM Pemerintah Daerah Kota dalam peningkatan mutu statistik Daerah yang terintegrasi serta pengembangan infrastruktur;
- f) menyiapkan kegiatan bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, analisis, monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan lingkup sumber daya statistik sektoral; dan
- g) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.

G. Bidang Persandian dan Keamanan Informasi

Bidang Persandian dan Keamanan Informasi sebagai unsur lini yang dipimpin seorang Kepala Bidang, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam memimpin dan menyelenggarakan tugas urusan pemerintahan bidang persandian dan keamanan informasi meliputi perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan sub bidang urusan persandian, keamanan informasi serta layanan keamanan informasi. Kepala Bidang diberi tugas tambahan selaku Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional dalam lingkup tanggung jawabnya.

Bidang Persandian dan Keamanan Informasi mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana kerja Bidang Persandian dan Keamanan Informasi;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional dalam lingkup tugas Bidang Persandian dan Keamanan Informasi;
- c. pengoordinasian penyiapan bahan penyusunan perencanaan lingkup tugas Bidang Persandian dan Keamanan Informasi;
- d. pengoordinasian penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional Bidang Persandian dan Keamanan Informasi;
- e. pengoordinasian penyelenggaraan tugas Bidang Persandian dan Keamanan Informasi;
- f. penyiapan bahan bimbingan dan pengendalian teknis Bidang Persandian dan Keamanan Informasi;
- g. pengoordinasian penyiapan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan tugas Bidang Persandian dan Keamanan Informasi;
- h. pengelolaan layanan administrasi dalam lingkup tugas Bidang Persandian dan Keamanan Informasi;
- i. pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pengelolaan layanan administrasi dalam lingkup tugas Bidang Persandian dan Keamanan Informasi; dan
- j. pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan Wali Kota serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bidang Persandian dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya dibantu oleh:

- a. Sub Koordinator Persandian;
- b. Sub Koordinator Keamanan Informasi; dan
- c. Sub Koordinator Layanan Keamanan Informasi.

a. Sub Koordinator Persandian

Sub Koordinator Persandian mempunyai tugas:

- a) menyiapkan kegiatan penyusunan perencanaan, program dan kegiatan lingkup persandian;
- b) menyiapkan bahan perumusan kebijakan daerah lingkup persandian;kup persandian;
- c) menyiapkan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya;
- d) menyiapkan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan tugas lingkup persandian;
- e) menyiapkan kegiatan pelaksanaan kebijakan lingkup persandian meliputi pelaksanaan operasionalisasi jaring komunikasi sandi Pemerintah Daerah Kota;
- f) menyiapkan kegiatan bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, analisis, monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan lingkup persandian; dan
- g) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.

b. Sub Koordinator Keamanan Informasi

Sub Koordinator Keamanan Informasi mempunyai tugas:

- a) menyiapkan kegiatan penyusunan perencanaan, program dan kegiatan lingkup keamanan informasi;
- b) menyiapkan bahan perumusan kebijakan daerah lingkup keamanan informasi;
- c) menyiapkan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya;
- d) menyiapkan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan tugas lingkup keamanan informasi;
- e) menyiapkan kegiatan pelaksanaan kebijakan lingkup keamanan informasi meliputi pelaksanaan penetapan kebijakan tata kelola keamanan informasi dan jaring komunikasi sandi Pemerintah Daerah

Kota, pelaksanaan keamanan informasi Pemerintah Daerah Kota berbasis elektronik dan non elektronik

- f) menyiapkan kegiatan bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, analisis, monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan lingkup keamanan informasi; dan
- g) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.

c. Sub Koordinator Layanan Keamanan Informasi

Sub Koordinator Layanan Keamanan Informasi mempunyai tugas:

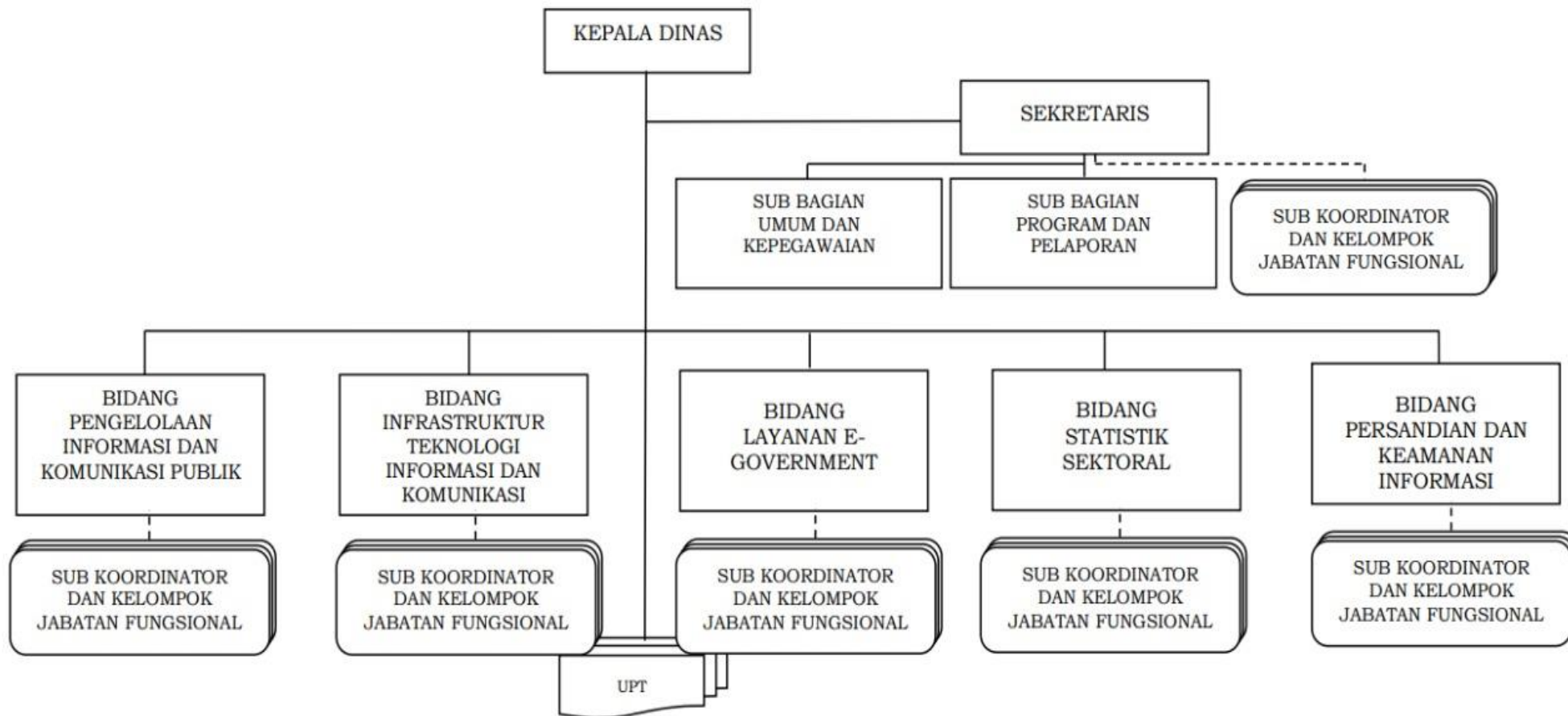
- a) menyiapkan kegiatan penyusunan perencanaan, program dan kegiatan lingkup layanan keamanan informasi;
- b) menyiapkan bahan perumusan kebijakan daerah lingkup layanan keamanan informasi;
- c) menyiapkan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya;
- d) menyiapkan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan tugas lingkup layanan keamanan informasi;
- e) menyiapkan kegiatan pelaksanaan kebijakan lingkup layanan keamanan informasi meliputi pelaksanaan pelaksanaan analisis kebutuhan dan pengelolaan sumber daya keamanan informasi pemerintah Daerah Kota serta penyediaan layanan keamanan informasi pemerintah Daerah Kota;
- f) menyiapkan kegiatan bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, analisis, monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan lingkup layanan keamanan informasi; dan
- g) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.

H. Kelompok Jabatan Fungsional

- a. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas sesuai dengan bidang keahlian dan kebutuhan sesuai Peraturan dan perundang-undangan.
- b. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

- c. Setiap Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional yang ditunjuk dan bertanggungjawab kepada pejabat penilai.
- d. Pembentukan jabatan fungsional ditetapkan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan, dan beban kerjanya.
- e. Tugas, jenis dan jenjang kelompok Jabatan Fungsional diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DUNAS KOMUNIKASI,INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA CIREBON



Gambar 1. Struktur Organisasi

Kelembagaan

Kelembagaan DKIS Kota Cirebon sebagaimana diatur pada Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 96 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Cirebon dipimpin oleh Kepala Dinas dengan dibantu oleh Sekretaris dan Lima Kepala Bidang yaitu Bidang Layanan E-Government; Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik; Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi; Bidang Statistik Sektoral dan Bidang Persandian dan Keamanan Informasi.

Sumber Daya Manusia

Pemerintah Daerah Kota Cirebon dengan berbagai tugas dan fungsi adalah membantu Wali Kota dalam melaksanakan tugas urusan Pemerintah dan tugas pembantuan sesuai dengan bidang urusannya. Personil yang membantu Wali Kota dalam menjalankan tugasnya adalah ASN Pemerintah Daerah Kota Cirebon yang dikategorikan melalui umur adalah sebagai berikut :

Tabel 4 Jumlah ASN Pemerintah Kota Cirebon Berdasarkan Kelompok Pendidikan dan Jenis Kelamin

No.	Pendidikan	Jenis Kelamin	
		Laki-Laki (orang)	Perempuan (orang)
1	SD	5	0
2	SLTP	21	3
3	SLTA	412	77
4	DI/DII	11	12
5	DIII/DIV	229	479
6	S1	1285	2200
7	S2	229	231
8	S3	1	0
9	Jumlah	2193	3002
Total Keseluruhan		5195	

Sumber data Cirebon Satu Data, 2023

Dari Jumlah 5195 ASN Pemerintah Daerah Kota Cirebon, 59 orang diantaranya adalah ASN Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Cirebon dengan tugas pokok dan fungsinya membantu Wali Kota Cirebon melaksanakan tugas urusan pemerintah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah di bidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian yang cukup berkompeten pada kondisi sampai dengan Oktober 2024 sebanyak dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 5 Pendidikan dan Jenis Kelamin

No.	Pendidikan	Jenis Kelamin	
		Laki-Laki (orang)	Perempuan (orang)
1	SD	0	0
2	SLTP	0	0
3	SLTA	3	0
4	DI/DII	0	0
5	DIII/DIV	6	1
6	S1	18	18
7	S2	10	3
8	S3	0	0
9	Jumlah	37	22
Total Keseluruhan		59	

Pegawai Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Cirebon bila dikelompokkan berdasarkan golongan dijelaskan pada Tabel di bawah ini.

Tabel 6 Pegawai Berdasarkan Golongan

Golongan	Jumlah orang
Gol 2	7 orang
Gol 3	36 orang
Gol 4	7 orang
PPPK IX	7 orang
PPPK VII	2 orang
Jumlah	59 orang

1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Renja DKIS Kota Cirebon Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

- a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 1999 tentang telekomunikasi;
- b. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- d. Keputusan Presiden RI Nomor 9 Tahun 2003 tentang Tim Koordinasi Telematika Indonesia;
- e. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government;
- f. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 tahun 2018 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Cirebon;
- g. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rincian Urusan Pemerintahan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon;
- h. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon;
- i. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 29 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Cirebon.
- j. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 44 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Cirebon Tahun 2024-2026;
- k. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 46 Tahun 2023 Tentang Rencana Pemerintah Daerah Kota Cirebon Tahun 2024-2026;
- l. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 49 Tahun 2023 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Cirebon Tahun 2024-2026;

1.3 Maksud dan Tujuan

Disusunnya Rencana Kerja sebagai rencana tindak lanjut tahun 2025, maka DKIS lebih memfokuskan arah pelaksanaan sasaran-sasaran yang tertuang dalam rencana strategik dengan disertai strategi pencapaiannya melalui program-program dan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam tahun 2025. Penetapan dimulai dengan rencana kinerja kegiatan dan sasaran yang akan memberikan daya dorong sekaligus sebagai komitmen untuk merencanakan dan mengendalikan sumber daya yang diserahkan kepada DKIS dan akan dilaporkan penggunaannya lewat Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) pada setiap akhir Tahun.

Sedangkan tujuan disusunnya Renja DKIS Tahun 2025 adalah :

- a. mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dalam urusan komunikasi dan informatika, urusan Statistik dan Urusan Persandian.
- b. mewujudkan efektifitas kegiatan dalam penyelenggaraan pendayagunaan dalam urusan komunikasi dan informatika, urusan Statistik dan Urusan Persandian.
- c. Optimalnya penggunaan alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan komunikasi, informatika, Statistik dan Persandian di Kota Cirebon.

1.4 Sistematika Penyusunan

Adapun sistematika penulisan dalam dokumen Renja DKIS Kota Cirebon Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

I.1. Latar Belakang

I.2. Landasan Hukum

I.3. Maksud dan Tujuan

I.4. Sistematika Penulisan

Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja DKIS Tahun Lalu :

	II.1.Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2024 dan Capaian Restra DKIS
	II.2.Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
	II.3.Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
	II.4.Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
Bab III	Tujuan, Sasaran Program dan Kegiatan
	III.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Propinsi
	III.2. Tujuan dan Sasaran Renja
Bab IV	Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah
Bab V	Penutup

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DKIS TAHUN 2023

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Cirebon Tahun 2023

Keberhasilan yang telah dicapai dalam pelaksanaan kegiatan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Cirebon pada tahun 2023 ditentukan dari hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang direncanakan dan telah sesuai dengan RENJA dan APBD Kota Cirebon.

Evaluasi terhadap Rencana Kerja DKIS Kota Cirebon meliputi 3 (tiga) hal:

1. Target realisasi program/kegiatan yang tidak sesuai dengan target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Target realisasi program/kegiatan yang telah sesuai dengan target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, dan
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

Pada tahun 2023 anggaran Belanja DKIS Kota Cirebon sebesar Rp.19.704.237.657,00 dengan realisasi sebesar Rp.18.181.896.832,00 atau (92,27%). Program dan kegiatan adalah sebagai pelaksanaan pada setiap program dan kegiatan pembangunan dan sebagai acuan yang akan memberikan kemudahan bagi SKPD untuk menentukan arah dan sasaran kegiatan dan pengukuran tingkat keberhasilannya, maka program dan kegiatan yang disusun Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik tahun 2023 terdiri dari 5 (lima) Program, 14 (Empat Belas) Kegiatan dan 52 (Lima Puluh Dua) Sub Kegiatan. Sedangkan ditahun 2024 anggaran Belanja DKIS Kota Cirebon sebesar Rp.19.264.246.644,00 dengan realisasi sampai dengan triwulan ke 2 sebesar Rp.2.848.659.693,00 atau (14,78%) dari 5 (lima) Program, 14 (Empat Belas) Kegiatan dan 64 (Enam Puluh Empat).

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel II.1 (sebagaimana terlampir).

Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan Indikator Kinerja	Target RENSTRA pada Tahun 2023 (Akhir Periode RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA s.d. RENJA Tahun Lalu (n-2) Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun Berjalan (n-1) yang Dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang Dievaluasi Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s.d. Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA s.d. Tahun 2023		Unit Kerja Penerimaan Anggaran Jawa Barat
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2	3		4		5		6		7		8		9		10		11 = 7+8+9+10		12 = 11/6 x100%		13 = 5+11		14 = 13/4 x100%		15
Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar																									
Bidang Komunikasi dan Informatika																									
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Layanan Administrasi Kepegawaian	Persen	100	11.347.277.326	-	-	100	13.234.276.501	10	3.054.543.155	30	2.346.896.458	30	2.922.744.639	30	1.708.109.224	100	12.412.484.431	100,00	93,79	100	12.412.484.431	100	1	SEKRE
	Cakupan Layanan Administrasi Keuangan	Persen	100	-	-	-																			
	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoren	Persen	100	-	-	-																			
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Keluaran: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	7	115.197.097			7	148.275.265	-	-	3	42.443.205	1	27.965.310	3	36.196.812	7	111.800.965	100	75,40	7	111.800.965	100	97	SEKRE

	Hasil :Terpenuhinya informasi perencanaan sebagai bahan dan acuan pelaksanaan kegiatan Perangkat Daerah	Persen	100	-	-	-	100									-	-	-	-	-	-	-	
sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	5	34.991.114	-	-	5	34.991.114	-	2	19.511.914	3		5	19.511.914	100	55,76	5	19.511.914	100	56		
sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	8.198.738	-	-	1	8.105.138	-		-			1	5.195.638	100	64	1	5.195.638	100	63		
sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	6.751.554			1	6.751.338	-		-	5.195.638	1	1	5.195.638	100	77	1	5.195.638	100	77		
sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	7.124.238	-	-	1	7.124.238	-		-	1	7.124.238	1	7.124.238	100	100	1	7.124.238	100	100		
sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	6.756.288			1	6.756.288	-		-	1	5.195.638	1	5.195.638	100	77	1	5.195.638	100	77		
sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	5	27.584.671	-	-	5	27.584.671	-	1	7.499.263	12.687.276	4	2.697.132	5	22.883.671	100	82,96	5	22.883.671	100	83	
sub kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	6	23.790.494			6	56.962.478	-	2	15.432.028	10.082.396	4	21.179.804	6	46.694.228	100	82	6	46.694.228	100	196	

Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Keluaran : Dokumen Informasi Keuangan prangkat Daerah	Jenis	3	7.920.460.948			3	7.746.422.239	1	2.259.822.155	-	1.920.261.714	1	1.696.141.764	1	1.671.912.412	3	7.548.138.045	100	97	3	7.548.138.045	100	95	
	Hasil :Terpenuhinya informasi administrasi Keuangan sebagai bahan audit keuangan Perangkat Daerah	Persen	100	-	-	-	100										-	-	-	-	0	-	0	-	
sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Pegawai	60	7.912.223.448			60	7.738.184.739	52	2.259.822.155	51	1.920.261.714	51	1.696.141.764	51	1.671.912.412	50	7.548.138.045	83	98	50	7.548.138.045	83,333	95	
sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	2	2.998.900	-	-	2	2.998.900		-	-		2				2	-	100	-	2	-	100	-	
sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	12	5.238.600	-	-	12	5.238.600		-	5	-	4				12	-	100	-	12	-	100	-	
Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Keluaran : Dokumen administrasi barang milik daerah pada Perangkat Daerah	jenis	1	22.226.800			1	22.893.604			1						1	-	100	-	1	-	100	-	
	Hasil :Terpenuhinya administrasi barang milik daerah pada Perangkat Daerah	Persen	100	-	-	-	100										-	-	-	-	0	-	0	-	
sub kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	22.226.800			1	22.893.604		-	-						-	-	-	-	0	-	0	-	

Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Keluaran : Dokumen Kepegawaian aparaturn daerah	Jenis	1	60.000.000			1	23.896.000					21.012.000			-	21.012.000	-			21.012.000	0	35	
	Hasil : Terwujudnya disiplin dan kapasitas aparaturn Daerah	Persen	100	-	-	-	100									-	-	-	-		-	0	-	
sub kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	2	60.000.000			2	23.896.000	-	-		1	21.012.000			1	21.012.000	-		1	21.012.000		35	
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Keluaran: Dokumen Sarana dan prasarana perangkat daerah	Jenis	6	632.284.011			6	744.414.416	-	4	9.199.520		160.274.450	2		6	595.469.745	100	79,99	6	595.469.745	100	94	
	Hasil : Terpenuhi sarana dan prasarana kantor Perangkat Daerah	Persen	100	-	-	-	100									-	-	-	-	0	-	0	-	
sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	59.268.435	-	-	1	59.268.110	-			1	55.697.200		1.000.000	1	56.697.200	100	95,66	1	56.697.200	100	96	
sub kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	4.243.800	-	-	1	4.243.800	-	1			2.250.000		1.800.000	1	4.050.000	100	95,43	1	4.050.000	100	95	
sub kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	100.801.690	-	-	2	116.987.480	-			1	8.255.225	1	93.529.850	2	101.785.075	100	87,01	2	101.785.075	100	101	
sub kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	umlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	12	21.000.000	-	-	12	21.552.000	-	5		4	10.776.000	3	10.776.000	12	21.552.000	100	100,00	12	21.552.000	100	103	
sub kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Laporan	12	30.000.000			12	56.250.000	-	5		4		3	33.000.000	12	33.000.000	100	58,67	12	33.000.000	100	110	
sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	416.970.086	-	-	12	486.113.026	-	5	9.199.520	4	83.296.025	3	285.889.925	12	378.385.470	100	77,84	12	378.385.470	100	91	

Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Keluaran: Dokumen pengadaan barang milik daerah penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jenis	2	224.056.475	-	-	2	2.207.204.650			-		697.450.000			-	2.121.837.000	-	96,13	0	2.121.837.000	0	947	
	Hasil : Terpenuhinya pengadaan barang milik daerah penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen	100				100									-	-	-	-	0	-	0	-	
Sub kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	2	24.057.600	-	-	0	-		-						-	-	-		0	-	0	-	
sub kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	15	199.998.875			15	2.207.204.650		-			697.450.000	15	1.424.387.000	15	2.121.837.000	100	96,13	15	2.121.837.000	100	1061	
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Keluaran: Dokumen jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis	2	863.494.700	-	-	2	1.002.224.332		83.490.000	2	276.342.019		276.801.140		2	936.276.226	100	93,42	2	936.276.226	100	108	
	Hasil : Terpenuhinya jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100	-	-	-	100									-	-	-	-	0	-	0	-	
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	313.512.600	-	-	12	418.946.600		-	5	161.352.019	4	109.852.693	3	86.918.067	12	358.122.779	100	85,48	12	358.122.779	100	114
Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	549.982.100	-	-	12	583.277.732	3	83.490.000	2	114.990.000	4	166.948.447	3	212.725.000	12	578.153.447	100	99,12	12	578.153.447	100	105
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Keluaran: Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis	5	924.062.832	-	-	5	1.338.945.995		711.231.000	4	98.650.000		43.099.975	1		5	1.077.950.450	100	81	5	1.077.950.450	100	117

	Hasil : Terpenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100	-	-	-	100									-	-	-	-	0	-	0	-	
sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	43.315.000	-	-	1	41.570.200	-	1	7.425.000	1.355.800	18.125.000	1	26.905.800	100	65	1	26.905.800	100	62			
sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	28	332.620.000			28	373.118.510	-	28	79.225.000	2.465.800	104.098.000	28	185.788.800	100	50	28	185.788.800	100	56			
sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	4	423.381.192	-	-	4	793.284.605	-		711.231.000	-	4	58.929.000	4	770.160.000	100	-	4	770.160.000	100	-		
sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	54	54.764.000	-	-	54	54.670.200	-	20		10	12.750.000	24	12.750.000	54	25.500.000	100	-	54	25.500.000	100	-	
sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	12	69.982.640	-	-	12	76.302.480	-	5	12.000.000	4	26.528.375	3	31.067.475	12	69.595.850	100	91	12	69.595.850	100	99	
PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Jumlah layanan informasi dan komunikasi publik kepada masyarakat yang efektif dan efisien	Informasi	420	2.584.877.015	-	-	420	3.630.380.924	248.488.464	5	848.062.964	385	843.829.254	87	1.457.777.802	477	3.398.158.484	114	94	477	3.398.158.484	113,571	131	BID - P I K P

Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Keluaran: Dokumen penyebarluasan informasi pembangunan dan pemerintahan kepada masyarakat	Jenis	11	-	-	-	11	3.630.380.924		248.488.464		848.062.964		843.829.254	11	1.457.777.802	11	3.398.158.484	100	94	11	3.398.158.484	100	-	B I D · P I K P
	Hasil : Terwujudnya penyebarluasan informasi pembangunan dan pemerintahan kepada masyarakat	Persen	100				100										-	-	-	-	0	-	0	-	
Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Dokumen	1	5.500.000	-	-	1	2.700.000	-			1.350.000			1		1	1.350.000	100	50	1	1.350.000	100	25	
Sub Kegiatan Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Dokumen	12	92.483.888			12	83.131.596	3	9.911.516	3	15.761.516	3	10.661.516	3	34.534.548	12	70.869.096	100	85,25	12	70.869.096	100	77	
Sub Kegiatan Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Dokumen	1	5.500.000	-	-	0	-	-								-	-	-	-	0	-	0	-	
Sub Kegiatan Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Dokumen	12	118.901.940			12	233.485.672	3	9.117.012	3	25.224.812	3	9.117.012	3	182.445.036	12	225.903.872	100	97	12	225.903.872	100	190	
Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Dokumen	12	749.999.874	-	-	12	1.336.999.844	3	25.444.024	3	246.965.524	3	317.861.024	3	590.225.072	12	1.180.495.644	100	88	12	1.180.495.644	100	157	
Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	Dokumen	12	449.985.608			12	421.718.692	3	61.436.732	3	72.131.732	3	65.186.732	3	216.125.196	12	414.890.392	100	98,38	12	414.890.392	100	92	
Sub Kegiatan Layanan Hubungan Media	Jumlah Layanan Hubungan Media	Layanan	2	103.853.300			2	311.609.900	-		1	230.193.400		-	1	78.960.000	2	309.153.400	100	99,21	2	309.153.400	100	298	

Sub Kegiatan Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Dokumen	1	158.499.950			1	361.071.740		-	-	109.517.800		221.472.000	1		1	330.989.800	100	91,67	1	330.989.800	100	209	
Sub Kegiatan Manajemen Komunikasi Krisis	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Manajemen Komunikasi Krisis	Dokumen	1	5.500.000			1	-		-	-	-					-	-	-	#DIV/0!	0	-	0	-	
Sub Kegiatan Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Terpenuhinya Sumber Daya Komunikasi Publik yang Kompeten	Orang	59	91.416.150	-	-	59	9.143.000		-	-	-					-	-	-	-	0	-	0	-	
Sub Kegiatan Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Dokumen	1	949.999.865			1	870.520.480		142.579.180	-	146.918.180		219.530.970	1	355.487.950	1	864.516.280	100	99,31	1	864.516.280	100	91	
PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Layanan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi yang handal dan sesuai kebutuhan (Perhitungan Service Level Agreement = target total minimal waktu layanan satu tahun dibagi jumlah total waktu layanan satu tahun x 100)	Persen	80	4.610.505.202	-	-	80	2.306.642.945		40.800.934		130.537.461		582.849.457			-	2.035.769.633	-	88	0	2.035.769.633	0	44	
	Penilaian Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Hasil Evaluasi SPBE dibagi Hasil Evaluasi SPBE dari Dinas x 100 %)	Persen	100				100										-	-	-	-	0	-	0	-	
Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Keluaran: Tersedianya Layanan Infrastruktur yang Handal sesuai Kebutuhan	Layanan	3	3.364.083.547	-	-	4	1.510.674.357		13.432.362	1	44.677.362		315.379.543	3		4	1.414.903.618	100,00	94	4	1.414.903.618	133,333	-	BIDANG ITIK
	Hasil : Terpenuhinya Sarana dan Prasarana TIK	Layanan	3				4										-	-	-	-	0	-	0	-	

Sub Kegiatan Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	Domain	2	48.100.000	-	-	2	40.685.000	-		26.265.000	2	12.582.000			2	38.847.000	-	95	2	38.847.000	100	-	
Sub Kegiatan Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	2	50.807.000	-	-	2	31.799.500	-								-	-	-	0	-	0	-	
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Unit	80	3.265.176.547	-	-	76	1.438.189.857	13.432.362	56	18.412.362		302.797.543	20	1.041.414.351	76	1.376.056.618	100	96	76	1.376.056.618	95	42	
Kegiatan Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Keluaran :Terselenggaranya layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Persen	85	1.246.421.655	-	-	90	795.968.588	27.368.572		85.860.099		267.469.914			-	620.866.015	-	78	0	620.866.015	0	50	B I D - E G O V
	Hasil : Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Persen	85				90									-	-	-	-	0	-	0	-	
Sub Kegiatan Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E - Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	1	89.999.750	-	-	1	49.619.750	-		793.450		3.000.000	1		1	3.793.450	100	8	1	3.793.450	100	4	
Sub Kegiatan Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Dokumen	1	6.717.350			1	6.717.350	-							-	-	-	-	0	-	0	-	
Sub Kegiatan Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	Unit	1	399.999.950	-	-	1	65.633.200	-		791.800		1.750.000	1	60.550.000	1	63.091.800	100		1	63.091.800	100	16	

Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Dokumen	1	6.499.800	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0	-	-
Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	Dokumen	1	6.499.850			1	4.699.850	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0	-	-
Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Jumlah Perangkat Daerah yang Menerapkan Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Perangkat Daerah	2	6.499.850	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0	-	-
Sub Kegiatan Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	Unit	5	299.999.732			5	164.989.069	0	17.374.548	19.374.548	78.982.878	5	43.936.370	5	159.668.344	100	96,78	5	159.668.344	100	53
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Jumlah Layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Layanan	2	69.973.300			0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0	-	-
Sub Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City	dokumen	1	419.999.669	-	-	1	353.629.469	9.994.024	15.740.401	152.037.036	1	135.681.060	1	313.452.521	100	88,64	1	313.452.521	100	75	-
Sub Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Dokumen	1	189.999.800	-	-	1	150.679.900	-	49.159.900	31.700.000	1	-	1	80.859.900	100	54	1	80.859.900	100	43	-

Sub Kegiatan Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	Jumlah Dokumen Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	Dokum en	1	6.499.500	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0	-		
																-	-	-	-	0	-	0	-	
PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik sebagai bahan perencanaan dan evaluasi (Jumlah PD yang menggunakan data statistik sebagai bahan perencanaan dan evaluasi perbandingan jumlah PD yang menggunakan data statistik sektoral di Renja dan evaluasi Renja dibagi total PD x 100%)	Persen	75	634.462.137	-	-	80%	278.947.607	9.206.258	74.571.958	31.872.516	-	196.038.248	-	70	0	196.038.248	0	31	B I D · S T A T				
Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Keluaran: Dokumen hasil kegiatan statistik sektoral	Dokum en	4	634.462.137	-	-	4	278.947.607	9.206.258	2	74.571.958	2	31.872.516	-	80.387.516	4	196.038.248	100	70	4	196.038.248	100	31	
	Hasil: Jumlah Data Statistik Sektoral di Kota Cirebon melalui Penyelenggaraan Cirebon Satu Data (CSD)	Datase t	683				745									-	-	-	-	0	-	0	-	

Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Dokumen	3	233.139.829	-	-	3	116.659.226		4.799.182		6.279.182		11.458.364	2	71.573.364	2	94.110.092	67	81	2	94.110.092	66,667	40	
Sub Kegiatan Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah SDM yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Orang	70	46.193.400	-	-	70	45.698.000		-		15.300.000		-	-		-	15.300.000	-	33	0	15.300.000	0	33	
Sub Kegiatan Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	Dokumen	1	19.987.400			1	18.477.500		-	1	18.477.500		-			1	18.477.500	100	100	1	18.477.500	100	92	
Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Pelatihan Statistik Sektoral dari BPS	Orang	32	24.723.884	-	-	32	11.358.200		-	32	11.358.200		-			32	11.358.200	100	-	32	11.358.200	100	46	
Sub Kegiatan Pengembangan Infrastruktur	Jumlah Infrastruktur Statistik	Unit	1	87.285.290			1	38.457.456		4.407.076		4.407.076		8.814.152			-	26.442.456	-	69	0	26.442.456	0	30	
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral yang Dihimpun	Dokumen	1	49.367.500			1	48.297.225		-		18.750.000		11.600.000	1		1	30.350.000	100	63	1	30.350.000	100	61	
				-	-	-		-									-	-	-	-	0	-	0	-	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase Layanan Persandian dan Keamanan Informasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon dan Publik (Jumlah layanan yang diselenggarakan dibagi jumlah layanan keamanan informasi dikali 100%)	Persen	70	500.354.787			73%	253.989.680		10.064.206	-	39.602.206		19.726.309			-	139.446.036	-	55	0	139.446.036	0	28	B I D . S A N D I

Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Keluaran: Jumlah Layanan Keamanan Informasi di Pemerintah Daerah Kota Cirebon	Layanan	10	350.105.537	-	-	11	194.310.380	5.228.156	-	34.266.156	12.782.234	59.203.190	-	111.479.736	-	57	0	111.479.736	0	32		
	Hasil: Nilai Indeks Keamanan Informasi	Poin	370				375							-	-	-	-	0	-	0	-		
Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	Dokumen	1	99.999.901	-	-	1	38.365.584	620.000	-	620.000	620.000	-	310.000	-	2.170.000	6	0	2.170.000	0	2		
Sub Kegiatan Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Laporan	3	52.199.975			3	31.564.145	-	-	19.288.000	-	3	3	19.288.000	100	61	3	19.288.000	100	37		
Sub Kegiatan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Laporan	1	42.659.365	-	-	1	31.651.815	-	-	5.250.000	4.250.000	1	1	9.500.000	100	30	1	9.500.000	100	22		
Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	Perangkat Daerah	32	155.246.296	-	-	32	92.728.836	4.608.156	-	9.108.156	7.912.234	32	58.893.190	32	80.521.736	100	86,84	32	80.521.736	100	52	
Kegiatan Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Keluaran: Jumlah Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah	Perangkat Daerah / Instansi	7	150.249.250			7	59.679.300	4.836.050	-	5.336.050	6.944.075	7	10.850.125	7	27.966.300	100	46,86	7	27.966.300	100	19	BID

	Hasil: Jumlah Jaring Komunikasi Sandi Internal Pemerintah Daerah	JKS	1	-	-	-	1									-	-	-	-	0	-	0	-	S A N D I	
Sub Kegiatan Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	Perang kat Daerah	7	150.249.250			7	59.679.300		4.836.050	-	5.336.050		6.944.075	7	10.850.125	7	27.966.300	100	46,86	7	27.966.300	100	19	
								19.704.237.657	10	3.363.103.017		3.439.671.047		4.401.022.175		3.235.940.341		18.181.896.832				18.181.896.832			
																		92,27%	92,27%	Sangat Tinggi		0%	-		
																		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi					

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Cirebon **tidak mempunyai SPM** maka pada tabel ini tidak diisi.

Tabel 7 Pencapaian Kinerja Pelayanan

No	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun (thn n-2)	Tahun (thn n-1)	Tahun (thn n)	Tahun (thn n+1)	Tahun (thn n-2)	Tahun (thn n-1)	Tahun (thn n)	Tahun (thn n+1)	
1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan fungsi DKIS

Isu-isu penting pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Cirebon sekaligus menjadi permasalahan antara lain sebagai berikut :

1. PENGELOLAAN MEDSOS DAN WEBSITE: Jadwal konten belum terorganisir dengan baik, belum semua badan publik aktif melakukan pemanfaatan website dan media sosialnya, serta template konten belum merata;

2. PENGELOLAAN LAPOR: belum semua badan publik aktif dalam pengelolaan layanan LAPOR karena masih ditemukan badan publik yang belum memahami alur pelayanannya.
3. PENGELOLAAN PPID: belum semua badan publik aktif dalam pengelolaan layanan PPID karena masih ditemukan badan publik yang belum memahami alur pelayanannya;
4. PENGELOLAAN CIREBON SABER HOAKS: masih sedikit yang mengetahui adanya layanan CSH;
5. Belum dilakukannya Klasifikasi Media Iklan secara objektif
6. Pemetaan pemangku kepentingan, pelaksanaan bimtek dan sejenisnya serta kompetisi dan pemberian penghargaan belum dilakukan secara optimal
7. Pengelolaan CCTV Cirebon Matahatiku antara lainnya sebagai berikut :
 - Persebaran belum merata
 - Sebagian besar Infrastruktur masih milik swasta (CSR)
 - Pemanfaatan CCTV pada Perangkat Daerah dan Swasta
8. Pengelolaan Free Wifi antara lainnya sebagai berikut :
 - Persebaran belum merata
 - Sebagian besar Infrastruktur masih milik swasta (CSR)
9. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
 - Masih banyak aplikasi yang dikembangkan beda data base dan platform, sehingga perlu adanya upaya untuk diintegrasikan dan berbagi pakai database sistem yang dapat dimanfaatkan sistem lainnya
 - Jaringan koneksi intra pemerintah daerah yang menggunakan perangkat tanpa kabel (wireless) memiliki umur ekonomis, dan juga faktor alam seperti petir yang sangat mempengaruhi kinerja perangkat tersebut
10. Belum terpenuhinya jumlah peralatan komunikasi jaringan seperti HT Digital yang tidak terkendala jarak dan aman dari penyadapan untuk meningkatkan dan menunjang layanan komunikasi khususnya NTPD 112
11. Belum adanya kebijakan yang menjadi pedoman penyelenggaraan Satu Data di Tingkat Kota Cirebon sehingga menyebabkan :
 - Sulitnya mengumpulkan Data dari Produsen data;

- Tidak adanya standar data dan metadata sehingga terjadi duplikasi data yang tumpang tindih;
- Masih kurangnya kualitas data yang diolah dan dikumpulkan karena belum sesuai dengan prinsip satu data;
- Masih minimnya pengelola data yang memiliki pengetahuan tentang pengelolaan data.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Dari rancangan awal yang telah disusun pada Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Cirebon telah disesuaikan dengan perencanaan kinerja Dinas. Perencanaan Kinerja merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Cirebon, yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. Dalam dokumen rencana kinerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai berikut indikator kinerja sasaran, dan rencana capaiannya yang merupakan representasi tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Cirebon. Di samping itu, dokumen rencana kinerja juga memuat informasi tentang program, kegiatan, serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya. Melalui dokumen kinerja ini akan diketahui keterkaitan antara kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya, serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Cirebon. Untuk lebih jelasnya akan ditampilkan pada Tabel II.3 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD (Terlampir).

Tabel II.3 RIVIEW RANCANGAN AWAL RKPD

	RANCANGAN AWALRKPD TAHUN 2025					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		
				TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)				TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	8	9	2	3	4	8	9	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			22.039.300.659	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			22.039.300.657	
	2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			20.979.740.730	2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			20.979.740.727	
1,	2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat	83 Persen	11.864.865.606	2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat	83 Persen	11.864.865.607	
	2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Keluaran: Dokumen Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	7 Jenis	127.004.800	2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Keluaran: Dokumen Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	7 Jenis	127.004.800	

			Hasil : Terpenuhinya informasi perencanaan sebagai bahan dan acuan pelaksanaan kegiatan Perangkat Daerah	100 Persen				Hasil : Terpenuhinya informasi perencanaan sebagai bahan dan acuan pelaksanaan kegiatan Perangkat Daerah	100 Persen		
	2.16.01.2.01.0 001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	38.577.703,00	2.16.01.2.01.0 001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	38.577.703,00	
	2.16.01.2.01.0 002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	1 Dokumen	9.039.109,00	2.16.01.2.01.0 002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	1 Dokumen	9.039.109,00	
	2.16.01.2.01.0 003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	7.443.588,00	2.16.01.2.01.0 003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	7.443.588,00	
	2.16.01.2.01.0 004	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	7.854.472,00	2.16.01.2.01.0 004	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	7.854.472,00	
	2.16.01.2.01.0 005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	7.448.808,00	2.16.01.2.01.0 005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	7.448.808,00	

	2.16.01.2.01.006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dokumen	30.412.100,00	2.16.01.2.01.006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dokumen	30.412.100,00	
	2.16.01.2.01.007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Laporan	26.229.020	2.16.01.2.01.007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Laporan	26.229.020	
	2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Keluaran : Dokumen Informasi Keuangan prangkat Daerah	3 Jenis	8.732.308.195,00	2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Keluaran : Dokumen Informasi Keuangan prangkat Daerah	3 Jenis	8.732.308.196,00	
			Hasil :Terpenuhinya informasi administrasi Keuangan sebagai bahan audit keuangan Perangkat Daerah	100 Persen				Hasil :Terpenuhinya informasi administrasi Keuangan sebagai bahan audit keuangan Perangkat Daerah	100 Persen		
	2.16.01.2.02.001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	51 Orang/bulan	8.723.226.351,00	2.16.01.2.02.001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	51 Orang/bulan	8.723.226.352,00	
	2.16.01.2.02.005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	3.306.287,00	2.16.01.2.02.005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	3.306.287,00	

	2.16.01.2.02.007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	5.775.557,00	2.16.01.2.02.007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	5.775.557,00	
	2.16.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Keluaran : Dokumen administrasi barang milik daerah pada Perangkat Daerah	1 Jenis	24.505.047,00	2.16.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Keluaran : Dokumen administrasi barang milik daerah pada Perangkat Daerah	1 Jenis	24.505.047,00	
			Hasil :Terpenuhinya administrasi barang milik daerah pada Perangkat Daerah	100 Persen				Hasil :Terpenuhinya administrasi barang milik daerah pada Perangkat Daerah	100 Persen		
	2.16.01.2.03.002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	24.505.047,00	2.16.01.2.03.002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	24.505.047,00	
	2.16.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Keluaran : Dokumen Kepegawaian aparatur daerah	1 Jenis	66.150.000	2.16.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Keluaran : Dokumen Kepegawaian aparatur daerah	1 Jenis	66.150.000	
			Hasil : Terwujudnya disiplin dan kapasitas aparatur Perangkat Daerah	100 Persen				Hasil : Terwujudnya disiplin dan kapasitas aparatur Perangkat Daerah	100 Persen		
	2.16.01.2.05.002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	66.150.000,00	2.16.01.2.05.002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	66.150.000,00	

	2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Keluaran: Dokumen Sarana dan prasarana perangkat daerah	6 Jenis	697.093.122	2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Keluaran: Dokumen Sarana dan prasarana perangkat daerah	6 Jenis	697.093.122	
			Hasil : Terpenuhinya sarana dan prasarana kantor Perangkat Daerah	100 Persen				Hasil : Terpenuhinya sarana dan prasarana kantor Perangkat Daerah	100 Persen		
	2.16.01.2.06.002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	65.343.450	2.16.01.2.06.002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	65.343.450	
	2.16.01.2.06.004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	4.678.790	2.16.01.2.06.004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	4.678.790	
	2.16.01.2.06.005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	111.133.863	2.16.01.2.06.005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	111.133.863	
	2.16.01.2.06.006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	12 Dokumen	23.152.500	2.16.01.2.06.006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	12 Dokumen	23.152.500	
	2.16.01.2.06.008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	33.075.000	2.16.01.2.06.008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	33.075.000	
	2.16.01.2.06.009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	459.709.520	2.16.01.2.06.009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	459.709.520	
	2.16.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Keluaran: Dokumen pengadaan barang milik daerah penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2 Jenis	247.022.264	2.16.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Keluaran: Dokumen pengadaan barang milik daerah penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2 Jenis	247.022.264	

			Hasil : Terpenuhinya pengadaan barang milik daerah penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen				Hasil : Terpenuhinya pengadaan barang milik daerah penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen		
	2.16.01.2.07.0 005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	26.523.504	2.16.01.2.07.0 005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	26.523.504	
	2.16.01.2.07.0 011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	15 Unit	220.498.760	2.16.01.2.07.0 011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	15 Unit	220.498.760	
	2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Keluaran: Dokumen jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2 Jenis	952.002.907	2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Keluaran: Dokumen jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2 Jenis	952.002.907	
			Hasil : Terpenuhinya jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen				Hasil : Terpenuhinya jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen		
	2.16.01.2.08.0 002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	345.647.642	2.16.01.2.08.0 002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	345.647.642	
	2.16.01.2.08.0 004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	606.355.265	2.16.01.2.08.0 004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	606.355.265	
	2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Keluaran: Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5 Jenis	1.018.779.272	2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Keluaran: Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5 Jenis	1.018.779.272	

			Hasil : Terpenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen				Hasil : Terpenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen		
	2.16.01.2.09.0 001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	47.754.788	2.16.01.2.09.0 001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	47.754.788	
	2.16.01.2.09.0 002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	28 Unit	366.713.550	2.16.01.2.09.0 002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	28 Unit	366.713.550	
	2.16.01.2.09.0 009	Pemeliharaan/Rehab ilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilit asi	4 Unit	466.777.764	2.16.01.2.09.0 009	Pemeliharaan/Reh abilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direh abilitasi	4 Unit	466.777.764	
	2.16.01.2.09.0 010	Pemeliharaan/Rehab ilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilit asi	12 Unit	60.377.310	2.16.01.2.09.0 010	Pemeliharaan/Reh abilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direh abilitasi	12 Unit	60.377.310	
	2.16.01.2.09.0 011	Pemeliharaan/Rehab ilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilit asi	54 Unit	77.155.861	2.16.01.2.09.0 011	Pemeliharaan/Reh abilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direh abilitasi	54 Unit	77.155.861	

2,	2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Presentase Masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah (jumlah Masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah dibagi jumlah penduduk x 100%)	88 Persen	3.749.258.883	2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Presentase Masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah (jumlah Masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah dibagi jumlah penduduk x 100%)	88 Persen	3.369.204.894	
	2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Keluaran : Dokumen pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	13 Dokumen	3.749.258.883	2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Keluaran : Dokumen pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	13 Dokumen	3.369.204.894	
			Hasil : Terwujudnya pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik yang baik (dihitung melalui survey indeks pengelolaan informasi dan komunikasi publik)	100 Persen				Hasil : Terwujudnya pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik yang baik (dihitung melalui survey indeks pengelolaan informasi dan komunikasi publik)	100 Persen	3.369.204.894	

	2.16.02.2.01.001	Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	1 Dokumen	6.063.750	2.16.02.2.01.0018	Sosialisasi Peraturan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase khalayak sasaran yang terpapar informasi terkait peraturan bidang informasi dan komunikasi publik	100 Persen	6.063.750	
	2.16.02.2.01.002	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	16 Dokumen	122.963.487	2.16.02.2.01.0019	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah	12 Rekomendasi	129.027.237	
	2.16.02.2.01.003	Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	1 Dokumen	6.063.750						
	2.16.02.2.01.004	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	12 Dokumen	131.089.389	2.16.02.2.01.0023	Penyusunan Konten	Jumlah Konten Informasi Publik	365 Konten	131.089.389	
	2.16.02.2.01.005	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	12 Dokumen	858.374.861	2.16.02.2.01.0020	Diseminasi Informasi	Persentase khalayak yang terpapar informasi publik	63 Persen	646.765.000	
						2.16.02.2.01.0021	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	73 Media	224.055.872	
	2.16.02.2.01.006	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	12 Dokumen	475.109.133	2.16.02.2.01.0017	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	185 Permohonan	103.609.133	
	2.16.02.2.01.008	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	1 Dokumen	229.871.195	2.16.02.2.01.0015	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasi an informasi dan	22 Komunitas	229.871.195	

								terdaftar di Dinas Kominfo			
	2.16.02.2.01.009	Manajemen Komunikasi Krisis	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Manajemen Komunikasi Krisis	1 Dokumen	27.063.750	2.16.02.2.01.022	Penyusunan Strategi Komunikasi Publik	Jumlah Strategi Komunikasi Publik yang disusun	12 Dokumen	6.063.750	
	2.16.02.2.01.010	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkatkan Kapasitasnya	111 Orang	48.286.305	2.16.02.2.01.024	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik	Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan	64 Orang	48.286.305	
	2.16.02.2.01.011	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	1 Dokumen	1.785.000.000	2.16.02.2.01.016	Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	Jumlah laporan Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah yang akuntabel serta disampaikan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika	1 Laporan	1.785.000.000	
	2.16.02.2.01.012	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	1 Dokumen	59.373.263	2.16.02.2.01.014	Relasi Media	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media	1 Laporan	59.373.263	
3,	2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Presentase Layanan Publik dan Administrasi Pemerintahan yang diselenggarakan secara elektronik dan terintegrasi	30 Persen	5.365.616.240,57	2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Presentase Layanan Publik dan Administrasi Pemerintahan yang diselenggarakan secara	30 Persen	5.745.670.226	

								elektronik dan terintegrasi			
			Presentase Perangkat Daerah (PD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh DKIS	100 Persen				Presentase Perangkat Daerah (PD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh DKIS	100 Persen		
	2.16.03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Keluaran : Tersedianya koneksi jaringan intranet di seluruh Perangkat Daerah (32 PD dan 22 kelurahan)	32 Perangkat Daerah	3.708.902.111	2.16.03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Keluaran : Tersedianya koneksi jaringan intranet di seluruh Perangkat Daerah (32 PD dan 22 kelurahan)	32 Perangkat Daerah	109.044.968	
			Hasil : Terselenggaranya Layanan Infrastruktur yang Handal sesuai Kebutuhan (persentase PD yg terkoneksi jaringan intranet dibagi seluruh PD di Kota Cirebon x 100 %)	100 Persen				Hasil : Terselenggaranya Layanan Infrastruktur yang Handal sesuai Kebutuhan (persentase PD yg terkoneksi jaringan intranet dibagi seluruh PD di Kota Cirebon x 100 %)	100 Persen		
	2.16.03.2.01.001	Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	3 Domain	53.030.250						

	2.16.03.2.01.002	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2 Dokumen	56.014.718	2.16.03.2.01.000	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa	1 Dokumen	109.044.968	
	2.16.03.2.01.003	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	54 Unit	3.599.857.143						
	2.16.03.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Keluaran: Jumlah sistem elektronik yang terintegrasi dalam portal layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan)	3 layanan	1.656.714.130	2.16.03.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Keluaran: Jumlah sistem elektronik yang terintegrasi dalam portal layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan)	3 layanan	5.636.625.258	
			Hasil : Terselenggaranya integrasi sistem elektronik ke dalam portal layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) (jumlah sistem elektronik yang terintegrasi ke portal layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) dibagi jumlah sistem elektronik dikali 100%)	100 Persen				Hasil : Terselenggaranya integrasi sistem elektronik ke dalam portal layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) (jumlah sistem elektronik yang terintegrasi ke portal layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) dibagi jumlah sistem elektronik dikali 100%)	100 Persen		

	2.16.03.2.02.001	Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	94.499.738	2.16.03.2.02.015	Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	Jumlah laporan hasil fasilitasi penyelenggaraa n SPBE di lingkungan Pemda	2 Laporan	280.000.000	
	2.16.03.2.02.003	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	1 Unit	419.999.948						
	2.16.03.2.02.010	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	1 Dokumen	199.499.790						
	2.16.03.2.02.002	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	1 Dokumen	7.053.218	2.16.03.2.02.022	Koordinasi penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen usulan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah yang telah	1 Dokumen	15.000.000	

	2.16.03.2.02.004	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	1 Dokumen	6.824.790			dikonsultasikan dengan seluruh Perangkat Daerah dan disampaikan kepada Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah dan Perangkat Daerah yang membidangi anggaran dan keuangan daerah			
	2.16.03.2.02.005	Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	1 Dokumen	6.824.843						
	2.16.03.2.02.006	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Jumlah Perangkat Daerah yang Menerapkan Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	2 Perangkat Daerah	6.824.843	2.16.03.2.02.017	Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi	Jumlah data dan informasi yang dipetakan berdasarkan Arsitektur SPBE pemerintah daerah	2 Dokumen	11.700.000	
	2.16.03.2.02.007	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	5 Unit	314.999.719	2.16.03.2.02.014	Koordinasi penyusunan proses bisnis	Jumlah dokumen proses bisnis di Dinas Kominfo	1 Dokumen	20.000.000	
						2.16.03.2.02.020	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	5 Unit	260.000.000	
						2.16.03.2.02.025	Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	2 Aplikasi	10.000.000	

	2.16.03.2.02.008	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Jumlah Layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	2 Layanan	73.471.965	2.16.03.2.02.021	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	1 Aplikasi	70.000.000	
	2.16.03.2.02.009	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City	1 Dokumen	440.999.652	2.16.03.2.02.023	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan sosialisasi program Kabupaten/Kota Cerdas	32 Unit	220.000.000	
						2.16.03.2.02.027	Implementasi Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten atau Kota Cerdas	Jumlah implementasi Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten/Kota Cerdas	3 Program	635.068.115	
						2.16.03.2.02.028	Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	Jumlah dokumen koordinasi Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	1 Dokumen	75.000.000	
	2.16.03.2.02.011	Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	Jumlah Dokumen Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	1 Dokumen	6.824.475						
	2.16.03.2.02.012	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE	1 Dokumen	78.891.149	2.16.03.2.02.019	Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	1 Dokumen	50.000.000	
						2.16.03.2.02.013	Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional	Jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang sudah ditempatkan di Pusat Data Nasional	1 Aplikasi	30.000.000	

						2.16.03.2.02.0 016	Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen keterhubungan pusat kendali dengan Pusat Data Nasional	1 Dokumen	50.000.000	
						2.16.03.2.02.0 018	Koordinasi penyusunan dan/atau rewi arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen arsitektur SPBE Pemerintah Daerah yang memuat 6 domain arsitektur dan peta rencana yang diusulkan	1 Dokumen	200.000.000	
						2.16.03.2.02.0 024	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	32 Perangkat Daerah	2.099.857.143	
						2.16.03.2.02.0 026	Fasilitasi penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka penyelenggaraa n Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo	1 Dokumen	100.000.000	
						2.16.03.2.02.0 029	Koordinasi pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE	Jumlah Aplikasi Umum yang telah dimanfaatkan	4 Aplikasi	10.000.000	
						2.16.03.2.02.0 030	Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE	Jumlah Perangkat Daerah yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	32 Perangkat Daerah	1.500.000.000	
	2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK			507.918.777	2.20	URUSAN PEMERINTAHAN			507.918.777	

							BIDANG STATISTIK				
1,	2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARA AN STATISTIK SEKTORAL	Persentase penyelenggaraan statistik sektoral (jumlah PD yg melakukan pengolahan data yang sesuai dengan manajemen CSD dibagi seluruh PD x 100%)	100 Persen	507.918.777	2.20.02	PROGRAM PENYELENGGAR AAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase penyelenggara an statistik sektoral (jumlah PD yg melakukan pengolahan data yang sesuai dengan manajemen CSD dibagi seluruh PD x 100%)	100 Persen	507.918.777	
	2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Keluaran : Dokumen hasil kegiatan statistik sektoral (profil, analisis data statistik sosial dan ekonomi,metadata)	4 Dokumen	507.918.777	2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Keluaran : Dokumen hasil kegiatan statistik sektoral (profil, analisis data statistik sosial dan ekonomi,metad ata)	4 Dokumen	507.918.777	
			Hasil : Terselenggaranya Cirebon Satu Data (CSD) melalui pemenuhan data statistik sektoral (jumlah dataset yang terisi dibagi jumlah dataset keseluruhan x 100%)	87,5 Persen				Hasil : Terselenggaran ya Cirebon Satu Data (CSD) melalui pemenuhan data statistik sektoral (jumlah dataset yang terisi dibagi jumlah dataset keseluruhan x 100%)	87,5 Persen		
	2.20.02.2.01.0 001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	3 Dokumen	257.036.661	2.20.02.2.01.0 008	Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data Statistik untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan dan/atau	75 Persen	257.036.661	

								Penyusunan Kebijakan			
	2.20.02.2.01.002	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah SDM yang Meningkat Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	84 Orang	50.928.224	2.20.02.2.01.007	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik	32 Orang	50.928.224	
	2.20.02.2.01.003	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	1 Dokumen	22.036.109	2.20.02.2.01.010	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata	1 Dokumen	22.036.109	
	2.20.02.2.01.004	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Pelatihan Statistik Sektoral dari BPS	32 Orang	27.258.082	2.20.02.2.01.011	Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar	Jumlah Statistik Sektoral yang sudah meminta rekomendasi dari Pembina Data Statistik	1 Dokumen	27.258.082	
	2.20.02.2.01.005	Pengembangan Infrastruktur	Jumlah Infrastruktur Statistik	1 Unit	96.232.032	2.20.02.2.01.009	Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral	Persentase kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu	75 Persen	150.659.701	
	2.20.02.2.01.006	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral yang Dihimpun	1 Dokumen	54.427.669						
	2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN			551.641.153	2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN			551.641.153	

	2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARA AN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Presentase Terselenggaranya Layanan Persandian dan Keamanan Informasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon	93 Persen	551.641.153	2.21.02	PROGRAM PENYELENGGAR AAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Presentase Terselenggaran ya Layanan Persandian dan Keamanan Informasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon	93 Persen	551.641.153	
	2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Keluaran : Jumlah Layanan Persandian dan Keamanan Informasi di Pemerintah Daerah Kota Cirebon	14 Layanan	385.991.355	2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Keluaran : Jumlah Layanan Persandian dan Keamanan Informasi di Pemerintah Daerah Kota Cirebon	14 Layanan	385.991.355	
			Hasil : Terlaksananya Jenis Layanan Persandian dan Keamanan Informasi di Pemerintah Daerah Kota Cirebon (Persentase layanan persandian dan keamanan informasi yg dilaks dibagi jumlah target jenis layanan persandian dan keamanan informasi yang akan dilaksanakan dikali 100%)	93 Persen				Hasil : Terlaksananya Jenis Layanan Persandian dan Keamanan Informasi di Pemerintah Daerah Kota Cirebon (Persentase layanan persandian dan keamanan informasi yg dilaks dibagi jumlah target jenis layanan persandian dan keamanan informasi yang akan dilaksanakan dikali 100%)	93 Persen		

	2.21.02.2.01.001	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	1 Dokumen	110.249.891	2.21.02.2.01.001	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	1 Dokumen	110.249.891	
	2.21.02.2.01.002	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	3 Laporan	57.550.472	2.21.02.2.01.002	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	3 Laporan	57.550.472	
	2.21.02.2.01.003	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	1 Laporan	47.031.950	2.21.02.2.01.003	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	1 Laporan	47.031.950	
	2.21.02.2.01.004	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	32 Perangkat Daerah	171.159.041	2.21.02.2.01.004	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	32 Perangkat Daerah	171.159.041	
	2.21.02.2.02	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Keluaran : Jumlah pemanfaatan Layanan hubungan komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah	2 Layanan	165.649.798	2.21.02.2.02	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Keluaran : Jumlah pemanfaatan Layanan hubungan komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah	2 Layanan	165.649.798	

			Hasil : terjaganya kerahasiaan komunikasi antar Perangkat Daerah (jumlah pemanfaatan hubungan komunikasi sandi perangkat daerah dibagi jumlah pola hubungan komunikasi sandi dikali 100%)	67 Persen				Hasil : terjaganya kerahasiaan komunikasi antar Perangkat Daerah (jumlah pemanfaatan hubungan komunikasi sandi perangkat daerah dibagi jumlah pola hubungan komunikasi sandi dikali 100%)	67 Persen		
	2.21.02.2.02.001	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	32 Perangkat Daerah	165.649.798	2.21.02.2.02.001	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	32 Perangkat Daerah	165.649.798	
	J U M L A H				22.039.300.659					22.039.300.657	

BAB III TUJUAN DAN SASARAN

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Rencana Kerja Pembangunan Daerah diaktualisasikan melalui Penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD yang akan diimplementasikan ke dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Cirebon. Dalam rangka mewujudkan konsistensi perencanaan pembangunan dan penganggaran, maka dokumen perencanaan disusun mulai dari RPJPD, RPJMD dan Renstra.

Rencana Kerja Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Cirebon merupakan Dokumen Perencanaan yang memberikan arah perencanaan pembangunan secara menyeluruh dan terpadu. Dalam proses penyusunan Renja juga harus memperhatikan kebijakan-kebijakan yang dilaksanakan baik oleh pemerintah pusat maupun provinsi.

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja

Visi adalah gambaran besar atau gambaran secara keseluruhan apa yang diinginkan. Misi adalah penjabaran yang akan dilakukan untuk mencapai atau mewujudkan Visi. Untuk mewujudkan Visi dan Misi Peran Strategis 2025-2045, memiliki Visi “Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan” sebagai berikut :

- **Maju** : Memiliki ekonomi yang berdaya saing, infrastruktur yang mantap serta tata kelola pemerintahan yang adaptif
- **Sejahtera** : Memiliki derajat kesehatan, kualitas pendidikan, pekerjaan, dan tingkat sosial yang layak, religius, berbudaya serta memiliki ketahanan, kemandirian dan produktif
- **Berkelanjutan** : Kemampuan Kota untuk menjaga dan mendukung produktivitas masyarakat dan lingkungan dengan aman dan nyaman secara terus menerus tanpa terbatas waktu

Sedangkan Misi Peran Strategis 2025-2045 adalah sebagai berikut:

1. Membangun Sumber Daya Manusia yang Sejahtera, Berdaya Saing dan Unggul;
2. Membangun Ekonomi Lokal yang Berdaya Saing Global, Inklusif, dan Berkelanjutan;
3. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Berintegritas;
4. Mewujudkan Ketenteraman dan Ketertiban Kota Cirebon menuju Kondusifitas dan Stabilitas Ekonomi Daerah;
5. Mewujudkan masyarakat madani yang berwawasan lingkungan, tangguh dan berbudaya;
6. Mewujudkan Kemantapan infrastruktur wilayah yang inklusif dan berketahanan;
7. Mewujudkan sarana prasarana pelayanan dasar yang berkualitas;
8. Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan;

Misi yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Komuniiasi Informatika dan Statistik Kota Cirebon adalah misi ke 3, yaitu Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Berintegritas dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, Meningkatkan Kualitas Kinerja, Kapasitas, dan Akuntabilitas Perangkat Daerah, serta Meningkatkan Inovasi dalam Manajemen Pemerintahan.

Adapun tujuan DKIS adalah sebagai berikut “Meningkatnya Pelayanan Publik Berbasis Elektronik”

Untuk mencapai tujuan tersebut Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Cirebon merumuskan sasaran sebagai berikut :

- a. Meningkatkan Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam rangka implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
- b. Meningkatkan pengelolaan layanan informasi dan komunikasi publik;
- c. Meningkatkan penggunaan data statistik sektoral dalam menyusun perencanaan dan evaluasi Pembangunan Daerah;

- d. Meningkatnya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah;
- e. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan Perangkat Daerah;

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Program dan Kegiatan

Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Cirebon mencakup Program dan Kegiatan tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 pada lampiran Tabel IV.1 sebagai berikut :

PENETAPAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA CIREBON
 TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENUJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK						20.388.368.340,00							23.295.796.788,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						20.388.368.340,00							23.295.796.788,00	
	2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA						19.196.500.762,00							22.183.258.953,00	
1.	2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat	83 Persen			83 Persen	11.518.542.560,00						83 Persen	12.458.108.888,00	
	2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	7 Jenis			7 Jenis	192.976.389,00			-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah 6. Peningk atan Profes ionalisme Birokrasi.	-	7 Jenis	133.355.039,00	DIHAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen			5 Dokumen	13.996.875,00	Kota Cirebon, Kesambi, Kesambi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah 6. Peningk atan Profes ionalisme Birokrasi.	-	5 Dokumen	40.506.588,00	DIHAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen			1 Dokumen	3.687.350,00	Kota Cirebon, Kesambi, Kesambi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah 6. Peningk atan Profes ionalisme Birokrasi.	-	1 Dokumen	9.491.064,00	DIHAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen			1 Dokumen	3.637.950,00	Kota Cirebon, Kesambi, Kesambi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah 6. Peningk atan Profes ionalisme Birokrasi.	-	1 Dokumen	7.815.767,00	DIHAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD</i>	1 Dokumen			1 Dokumen	3.637.850,00	Kota Cirebon, Kesambi, Kesambi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. 6. Peningkatan Profesionalisme Birokrasi.	-	1 Dokumen	8.247.196,00	DIHAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD</i>	1 Dokumen			1 Dokumen	3.637.850,00	Kota Cirebon, Kesambi, Kesambi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. 6. Peningkatan Profesionalisme Birokrasi.	-	1 Dokumen	7.821.248,00	DIHAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>	1 Laporan			1 Laporan	16.860.000,00	Kota Cirebon, Kesambi, Kesambi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. 6. Peningkatan Profesionalisme Birokrasi.	-	1 Laporan	31.932.705,00	DIHAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	6 Laporan			6 Laporan	147.518.514,00	Kota Cirebon, Kesambi, Kesambi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. 6. Peningkatan Profesionalisme Birokrasi.	-	6 Laporan	27.540.471,00	DIHAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Dokumen Informasi Keuangan prangkat Daerah</i>	3Jenis			3 Jenis	8.150.657.621,00			-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. 6. Peningkatan Profesionalisme Birokrasi.	-	3 Jenis	9.168.923.605,00	DIHAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>	51 Orang/bulan			60 Orang/bulan	8.142.432.521,00	Kota Cirebon, Kesambi, Kesambi	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. 6. Peningk atan Profes ionalisme Birokrasi.	-	51 Orang/bulan	9.159.387.669,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>	1 Laporan			1 Laporan	2.993.000,00	Kota Cirebon, Kesambi, Kesambi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. 6. Peningk atan Profes ionalisme Birokrasi.	-	1 Laporan	3.471.601,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan n/Semesteran SKPD</i>	12 Laporan			12 Laporan	5.232.100,00	Kota Cirebon, Kesambi, Kesambi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. 6. Peningk atan Profes ionalisme Birokrasi.	-	12 Laporan	6.064.335,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	<i>Dokumen administrasi barang milik daerah pada Perangkat Daerah</i>	1 Jenis			1 Jenis	24.018.000,00			-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. 6. Peningk atan Profes ionalisme Birokrasi.	-	1 Jenis	25.730.299,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD</i>	1 Dokumen			1 Dokumen	24.018.000,00	Kota Cirebon, Kesambi, Kesambi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. 6. Peningk atan Profes ionalisme Birokrasi.	-	1 Dokumen	25.730.299,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<i>Dokumen Kepegawaian aparatur daerah</i>	1 Jenis			1 Jenis	0,00			-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. 6. Peningk atan Profes ionalisme Birokrasi.	-	1 Jenis	69.457.500,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.16.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	2 Paket			0 Paket	0,00	Kota Cirebon, Kesambi, Kesambi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah 6. Peningk atan Profes ionalisme Birokrasi.	-	2 Paket	69.457.500,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dokumen Sarana dan prasarana perangkat daerah	6 Jenis			6 Jenis	836.057.590,00			-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah 6. Peningk atan Profes ionalisme Birokrasi.	-	6 Jenis	731.947.778,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket			1 Paket	60.341.814,00	Kota Cirebon, Kesambi, Kesambi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah 6. Peningk atan Profes ionalisme Birokrasi.	-	1 Paket	68.610.622,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket			1 Paket	4.629.600,00	Kota Cirebon, Kesambi, Kesambi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah 6. Peningk atan Profes ionalisme Birokrasi.	-	1 Paket	4.912.729,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket			2 Paket	123.366.150,00	Kota Cirebon, Kesambi, Kesambi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah 6. Peningk atan Profes ionalisme Birokrasi.	-	2 Paket	116.690.556,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>	12 Dokumen			12 Dokumen	23.136.000,00	Kota Cirebon, Kesambi, Kesambi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. 6. Peningk atan Profes ionalisme Birokrasi.	-	12 Dokumen	24.310.125,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.01.2.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu														
			<i>Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu</i>	12 Laporan			12 Laporan	61.500.000,00	Kota Cirebon, Kesambi, Kesambi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. 6. Peningk atan Profes ionalisme Birokrasi.	-	12 Laporan	34.728.750,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	12 Laporan			12 Laporan	563.084.026,00	Kota Cirebon, Kesambi, Kesambi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. 6. Peningk atan Profes ionalisme Birokrasi.	-	12 Laporan	482.694.996,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Dokumen pengadaan barang milik daerah penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	2 Jenis			2 Jenis	0,00			-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. 6. Peningk atan Profes ionalisme Birokrasi.	-	2 Jenis	259.373.377,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			<i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan</i>	2 Unit			0 Unit	0,00	Kota Cirebon, Kesambi, Kesambi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. 6. Peningk atan Profes ionalisme Birokrasi.	-	2 Unit	27.849.679,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>	15 Unit			0 Unit	0,00	Kota Cirebon, Kesambi, Kesambi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. 6. Peningkatan Profesionalisme Birokrasi.	-	15 Unit	231.523.698,00	DIHAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Dokumen jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	2 Jenis			2 Jenis	997.137.425,00			-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. 6. Peningkatan Profesionalisme Birokrasi.	-	2 Jenis	999.603.053,00	DIHAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	12 Laporan			12 Laporan	388.344.000,00	Kota Cirebon, Kesambi, Kesambi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. 6. Peningkatan Profesionalisme Birokrasi.	-	12 Laporan	362.930.024,00	DIHAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	12 Laporan			12 Laporan	608.793.425,00	Kota Cirebon, Kesambi, Kesambi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. 6. Peningkatan Profesionalisme Birokrasi.	-	12 Laporan	636.673.029,00	DIHAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	5 Jenis			5 Jenis	1.317.695.535,00			-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. 6. Peningkatan Profesionalisme Birokrasi.	-	5 Jenis	1.069.718.237,00	DIHAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya</i>	1 Unit			1 Unit	45.654.500,00	Kota Cirebon, Kesambi, Kesambi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. 6. Peningkatan Profesionalisme Birokrasi.	-	1 Unit	50.142.527,00	DIHAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.16.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	28 Unit			28 Unit	375.349.200,00	Kota Cirebon, Kesambi, Kesambi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. 6. Peningkat an Profesi ionalisme Birokrasi.	-	28 Unit	385.049.228,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit			4 Unit	740.442.035,00	Kota Cirebon, Kesambi, Kesambi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. 6. Peningkat an Profesi ionalisme Birokrasi.	-	4 Unit	490.116.652,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12 Unit			12 Unit	98.905.800,00	Kota Cirebon, Kesambi, Kesambi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. 6. Peningkat an Profesi ionalisme Birokrasi.	-	12 Unit	63.396.176,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	54 Unit			54 Unit	57.344.000,00	Kota Cirebon, Kesambi, Kesambi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. 6. Peningkat an Profesi ionalisme Birokrasi.	-	54 Unit	81.013.654,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
2.	2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Presentase Masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah	88 Persen			88 Persen	4.359.183.394,00						88 Persen	3.692.196.328,00	
	2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	13 Dokumen			13 Dokumen	4.359.183.394,00			-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. 6. Peningkat an Profesi ionalisme Birokrasi.	-	13 Dokumen	3.692.196.328,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.16.02.2.01.0014	Relasi Media	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dengan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media				1 Laporan	256.545.825,00	Kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah 6. Peningkatan Profesionalisme Birokrasi.	-		216.873.116,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.02.2.01.0015	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo				22 Komunitas	319.999.775,00	Kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah 6. Peningkatan Profesionalisme Birokrasi.	-		241.364.755,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.02.2.01.0016	Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	Jumlah laporan Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah yang akuntabel serta disampaikan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika				1 Laporan	1.299.999.880,00	Kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah 6. Peningkatan Profesionalisme Birokrasi.	-		1.874.250.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.02.2.01.0017	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan				185 Permohonan	428.004.180,00	Kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah 6. Peningkatan Profesionalisme Birokrasi.	-		108.789.590,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.02.2.01.0018	Sosialisasi Peraturan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase khalayak sasaran yang terpapar informasi terkait peraturan bidang informasi dan komunikasi publik				100 Persentase	5.774.500,00	Kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah 6. Peningkatan Profesionalisme Birokrasi.	-		6.366.938,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.02.2.01.0019	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah</i>				12 Rekomendasi	98.630.346,00	Kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. 6. Peningkatan Profesionalisme Birokrasi.	-		135.478.599,00	DIHAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.02.2.01.0020	Diseminasi Informasi														
			<i>Persentase khalayak yang terpapar informasi publik</i>				70 Persentase	0,00	Kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DBH CIKRA HASIL TEMBAKAU (CHT)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. 6. Peningkatan Profesionalisme Birokrasi.	-		679.103.250,00	DIHAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.02.2.01.0021	Pengelolaan Media Komunikasi Publik														
			<i>Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/dukuns</i>				73 Media	1.770.820.752,00	Kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. 6. Peningkatan Profesionalisme Birokrasi.	-		235.258.665,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.02.2.01.0022	Penyusunan Strategi Komunikasi Publik														
			<i>Jumlah Strategi Komunikasi Publik yang disusun</i>				12 Dokumen	25.774.850,00	Kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Penguatan Lingkungan Hidup serta Gerakan Masyarakat Sehat 6. Peningkatan Profesionalisme Birokrasi.	-		6.366.937,00	DIHAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.02.2.01.0023	Penyusunan Konten														
			<i>Jumlah Konten Informasi Publik</i>				365 Konten	124.846.786,00	Kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. 6. Peningkatan Profesionalisme Birokrasi.	-		137.643.858,00	DIHAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.02.2.01.0024	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bintek/peleatihan</i>				64 Orang	28.786.500,00	Kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. 6. Peningkatan Profesionalisme Birokrasi.	-		50.700.620,00	DIHAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
3.	2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	<i>Presentase Perangkat Daerah (PD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh DKIS Presentase Layanan Publik dan Administrasi Pemerintahan yang diselenggarakan secara elektronik dan terintegrasi</i>	100 Persen 40 Persen			100 Persen 30 Persen	3.318.774.796,00						100 Persen 40 Persen	6.032.953.737,00	
	2.16.03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Dilepasikan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	<i>Tersedianya koneksi jaringan internet di seluruh Perangkat Daerah (32 PD dan 22 kelurahan)</i>	32 Perangkat Daerah			32 Perangkat Daerah	103.769.000,00			-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. 6. Peningkatan Profesionalisme Birokrasi.	-	32 Perangkat Daerah	114.497.216,00	DIHAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.03.2.01.0004	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa														
			<i>Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa</i>				1 Dokumen	103.769.000,00	Kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. 6. Peningkatan Profesionalisme Birokrasi.	-		114.497.216,00	DIHAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.03.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah sistem elektronik yang terintegrasi dalam portal layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan)</i>	9 Layanan			3 Layanan	3.215.005.796,00			-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. 6. Peningkatan Profesionalisme Birokrasi.	-	3 Layanan	5.918.456.521,00	DIHAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.03.2.02.0013	Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional														
			<i>Jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang sudah ditempatkan di Pusat Data Nasional</i>				1 Aplikasi	20.000.000,00	Kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. 6. Peningkatan Profesionalisme Birokrasi.	-		31.500.000,00	DIHAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.03.2.02.0014	Koordinasi penyusunan proses bisnis														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah dokumen proses bisnis di Dinas Kominfo</i>				1 Dokumen	20.000.000,00	Kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah 6. Peningk atan Profes ionalisme Birokrasi.	-		21.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.03.2.02.0015	Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda														
			<i>Jumlah laporan hasil fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda</i>				2 Laporan	200.000.000,00	Kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah 6. Peningk atan Profes ionalisme Birokrasi.	-		294.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.03.2.02.0016	Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah														
			<i>Jumlah dokumen keterhubungan pusat kendali dengan Pusat Data Nasional</i>				1 Dokumen	20.000.000,00	Kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah 6. Peningk atan Profes ionalisme Birokrasi.	-		52.500.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.03.2.02.0017	Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi														
			<i>Jumlah data dan informasi yang dipetakan berdasarkan Arsitektur SPBE pemerintah daerah</i>				2 Dokumen	11.700.000,00	Kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah 6. Peningk atan Profes ionalisme Birokrasi.	-		12.285.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.03.2.02.0018	Koordinasi penyusunan dan/atau reviu arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah														
			<i>Jumlah dokumen arsitektur SPBE Pemerintah Daerah yang memuat 6 domain arsitektur dan peta rencana yang diusulkan</i>				1 Dokumen	150.000.000,00	Kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah 6. Peningk atan Profes ionalisme Birokrasi.	-		210.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.03.2.02.0019	Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE				1 Dokumen	50.000.000,00	Kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. 6. Peningkatan Profesionalisme Birokrasi.	-		52.500.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
2.16.03.2.02.0020		Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah														
			Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah				2 Aplikasi	160.000.000,00	Kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. 6. Peningkatan Profesionalisme Birokrasi.	-		273.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
2.16.03.2.02.0021		Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah														
			Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah				1 Aplikasi	50.000.000,00	Kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. 6. Peningkatan Profesionalisme Birokrasi.	-		73.500.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
2.16.03.2.02.0022		Koordinasi penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah														
			Jumlah dokumen usulan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah yang telah dikonsultasikan dengan seluruh Perangkat Daerah dan disampaikan kepada Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah dan Perangkat Daerah yang membidangi anggaran dan keuangan daerah				1 Dokumen	15.000.000,00	Kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. 6. Peningkatan Profesionalisme Birokrasi.	-		15.750.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
2.16.03.2.02.0023		Koordinasi dan Fasilitas Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas														
			Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan sosialisasi program Kabupaten/Kota Cerdas				32 unit	100.000.000,00	Kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. 6. Peningkatan Profesionalisme Birokrasi.	-		231.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
2.16.03.2.02.0024		Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota				32 Perangkat Daerah	785.505.798,00	Kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah 6. Peningkatan Profesionalisme Birokrasi	-		2.204.850.000,00	DIHAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.03.2.02.0025	Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi														
			Jumlah Layanan Penda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional				2 Layanan	10.000.000,00	Kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah 6. Peningkatan Profesionalisme Birokrasi	-		10.500.000,00	DIHAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.03.2.02.0026	Fasilitasi penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo														
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo				1 Dokumen	50.000.000,00	Kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah 6. Peningkatan Profesionalisme Birokrasi	-		105.000.000,00	DIHAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.03.2.02.0027	Implementasi Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten atau Kota Cerdas														
			Jumlah implementasi Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten/Kota Cerdas				3 Program	462.800.000,00	Kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah 6. Peningkatan Profesionalisme Birokrasi	-		666.821.521,00	DIHAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.03.2.02.0028	Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE														
			Jumlah dokumen koordinasi Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE				1 Dokumen	50.000.000,00	Kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah 6. Peningkatan Profesionalisme Birokrasi	-		78.750.000,00	DIHAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.03.2.02.0029	Koordinasi pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Aplikasi Umum yang telah dimanfaatkan</i>				4 Aplikasi	10.000.000,00	Kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah 6. Peningkatan Profesionalisme Birokrasi.	-		10.500.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.03.2.02.0030	Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE														
			<i>Jumlah Perangkat Daerah yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas</i>				32 Perangkat Daerah	1.050.000.000,00	Kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah 6. Peningkatan Profesionalisme Birokrasi.	-		1.575.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK						409.655.853,00							533.314.626,00	
1.	2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	<i>Persentase penyelenggaraan statistik sektoral</i>	100 Persen			100 Persen	409.655.853,00						100 Persen	533.314.626,00	
	2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	<i>Dokumen hasil kegiatan statistik sektoral (profil, analisis data statistik sosial dan ekonomi,metadata)</i>	4Dokumen			4 Dokumen	409.655.853,00			-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah 6. Peningkatan Profesionalisme Birokrasi.	-	4 Dokumen	533.314.626,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.20.02.2.01.0007	Peningkatan Kapasitas Kalembaragan Statistik Sektoral														
			<i>Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik</i>				32 Orang	88.470.600,00	Kota Cirebon, Kosambi, Kesambi	PEHDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah 6. Peningkatan Profesionalisme Birokrasi.	-		53.474.635,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.20.02.2.01.0008	Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional														
			<i>Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data Statistik untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan dan/atau Penyusunan Kebijakan</i>				75 Persentase	88.703.375,00	Kota Cirebon, Kosambi, Kesambi	PEHDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah 6. Peningkatan Profesionalisme Birokrasi.	-		269.888.495,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.20.02.2.01.0009	Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Persentase kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu				75 Persentase	155.913.454,00	Kota Cirebon, Kesambi, Kesambi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. 6. Peningkatan Profesionalisme Birokrasi.	-		158.192.686,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.20.02.2.01.0010	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia														
			Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata				1 Dokumen	40.000.000,00	Kota Cirebon, Kesambi, Kesambi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. 6. Peningkatan Profesionalisme Birokrasi.	-		23.137.914,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.20.02.2.01.0011	Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar														
			Jumlah Statistik Sektoral yang sudah meminta rekomendasi dari Pembina Data Statistik				1 Dokumen	36.568.424,00	Kota Cirebon, Kesambi, Kesambi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. 6. Peningkatan Profesionalisme Birokrasi.	-		28.620.896,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN						782.211.735,00							579.223.209,00	
1.	2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Presentase Terselenggaranya Layanan Persandian dan Keamanan Informasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon	93 Persen			93 Persen	782.211.735,00						93 Persen	579.223.209,00	
	2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Persandian dan Keamanan Informasi di Pemerintah Daerah Kota Cirebon	15 Layanan			14 Layanan	715.320.211,00			-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. 6. Peningkatan Profesionalisme Birokrasi.	-	15 Layanan	405.290.921,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.21.02.2.01.0001	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaringan Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaringan Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	1 Dokumen			1 Dokumen	198.866.500,00	Kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. 6. Peningkatan Profesionalisme Birokrasi.	-	1 Dokumen	115.762.385,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.21.02.2.01.0002	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</i>	3 Laporan			3 Laporan	315.940.800,00	Kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah 6. Peningkatan Profesionalisme Birokrasi.	-	3 Laporan	60.427.996,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.21.02.2.01.0003	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik														
			<i>Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik</i>	1 Laporan			1 Laporan	36.009.200,00	Kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah 6. Peningkatan Profesionalisme Birokrasi.	-	1 Laporan	49.383.547,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.21.02.2.01.0004	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi</i>	32 Perangkat Daerah			32 Perangkat Daerah	164.503.711,00	Kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah 6. Peningkatan Profesionalisme Birokrasi.	-	32 Perangkat Daerah	179.716.993,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.21.02.2.02	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah pemanfaatan Layanan hubungan komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah</i>	3 Layanan			2 Layanan	66.891.524,00			-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah 6. Peningkatan Profesionalisme Birokrasi.	-	3 Layanan	173.932.288,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.21.02.2.02.0001	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi</i>	7 Perangkat Daerah			32 Perangkat Daerah	66.891.524,00	Kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah 6. Peningkatan Profesionalisme Birokrasi.	-	7 Perangkat Daerah	173.932.288,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
J U M L A H								20.388.368.340,00							23.295.796.788,00	

BAB V PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi, informatika dan Statistik Kota Cirebon Tahun 2025 merupakan tahapan pengembangan Program dan Kegiatan prioritas guna mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kota Cirebon. Sebagaimana disebutkan dalam Undang – Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Pasal 1 point 11 bahwa Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja – SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Cirebon tahun 2025 disusun dengan berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023. Didalam rencana kerja ditetapkan target kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan.

Target kinerja yang disusun pada awal tahun anggaran akan menjadi komitmen bagi organisasi atau pemerintah untuk mencapainya dalam satu priode tahunan. Berdasarkan Rencana Kerja. SKPD menyusun rencana anggaran yang diperlukan dalam mewujudkan hasil-hasil (outcomes) yang akan dicapai dalam tahun yang bersangkutan. Anggaran yang disusun berdasarkan Renja adalah anggaran dengan pendekatan kinerja.

Penyusunan Rencana Kerja tidak terlepas dari sistim penganggaran unit kerja pada perangkat daerah bersangkutan. Oleh karena itu, kegiatan dengan anggaran tetap harus dipertimbangkan dalam rangka penyesuaian sasaran dan tujuan serta strategi pencapaian dengan perubahan yang terjadi dalam sistim penganggaran.

Penyusunan Rencana Kerja juga merupakan salah satu upaya untuk memberantas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Penjabaran APBD dalam RKA yang sedemikian rinci yang membandingkan input untuk menghasilkan suatu

output yang berorientasi hasil. Diharapkan pembelanjaan uang negara semakin jelas dan terukur. Akhirnya setiap rupiah uang negara atau daerah bermanfaat bagi masyarakat dan aparatur pemerintahan. Penyusunan RKA yang baik adalah pekerjaan yang mudah, namun yang lebih baik adalah bagaimana RKA yang disusun itu betul-betul berorientasi kepada azas manfaat, berdayaguna bagi seluruh pihak.